

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERANAN DAN FUNGSI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**

(Studi pada BPD di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



**Oleh**

**YUSEP PEBRIYANSAH**

**NPM. 1221020040**

**Jurusan : Siyasah Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**2019**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN FQIH SIYASAH TERHADAP PERANAN DAN FUNGSI BADAN**  
**PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN**  
**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**

Oleh  
**Yusep Pebriyansah**

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara Desa. Peranan BPD Bahway dalam mensejahterakan masyarakat desa di Desa Bahway Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, masih kurang aktif berdasarkan hasil observasi di desa Bahway Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, penulis menemukan fenomena bahwa tingkat penyelenggaraan pemerintah Desa Bahway yang demokratis dirasa belum optimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di Desa Bahway, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa menurut undang-undang ? 2) Bagaimana tinjauan *fiqh Siyash* terhadap peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa?

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan dilakukan dengan metode yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) dimana data-data yang diambil merupakan hasil penelitian dari lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Metode tersebut diperoleh melalui data – data yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta sumber – sumber lain yang mendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk mewujudkan penelitian yang mengacu pada kajian normatif, maka penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tinjauan *fiqh siyash* belum dapat direalisasikan secara utuh oleh BPD Bahway dan tingkat penyelenggaraan pemerintah desa dalam mensejahterakan Masyarakat Desa dirasa belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut : 1) Tidak ada partisipasi dari masyarakat Bahway untuk melaksanakan gotong-royong. 2) Dana yang ada di BPD tidak disalurkan untuk membangun Desa. 3) Hampir tidak pernah atau jarang sekali di adakan musyawarah. 4) Aspirasi perbaikan akses jalan di Desa Bahway yang sampai saat ini belum juga di realisasikan oleh BPD. Belum optimalnya tingkat penyelenggaraan pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat Desa ini berkenaan dengan beberapa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang belum dilaksanakan secara maksimal.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERANAN  
DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DESA**

**Nama Mahasiswa : Yusep Pebriyansah**

**NPM : 1221020040**

**Jurusan : Jinayah Siyasah**

**Fakultas : Syari'ah**

**DISETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag  
NIP.197012282000031002**

**Pembimbing II**

**Eko Hidayat, S.Sos., M.H  
NIP.197509302003121002**

**Ketua Jurusan Jinayah Siyasah**

**Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H  
NIP. 197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**, disusun oleh **Yusep Pebriyansah, NPM. 1221020040** Jurusan. **Jinayah Siyasa**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Rabu, 11 September 2019.

Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Sekretaris : Hasanudin, M.H.I

Penguji Utama : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji Pendamping I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Penguji Pendamping II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Chairuddin, M.H**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nissa: 58)



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Yusep Pebriyansah. Putra pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Nasri dan almarhumah Ibu Yusmiadah. Penulis di lahirkan di Pekon Pelita Jaya yang berada di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 28 Februari 1994. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Sebagai berikut:

1. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SD N 1 Bahway, tamat pada tahun 2005.
2. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MtsN 1 Liwa, tamat pada tahun 2008.
3. Melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas di SMK N 1 Liwa, tamat pada tahun 2011.
4. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan Tinggi, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung pada program study Jinayah Siyasah Fakultas Syariah.

## PERSEMBAHAN

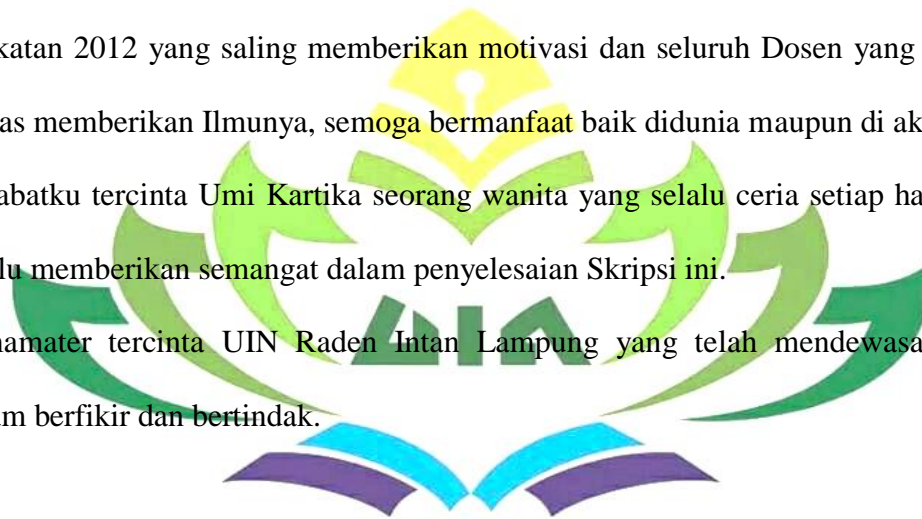
*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, Sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah Karya Tulis yang sangat sederhana ini namun mengandung begitu banyak cerita dan membutuhkan begitu banyak perjuangan yang berharga, dengan bangga Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Nasri dan almarhumah Ibunda Yusmiadah yang telah mendidik dan membesarkanku, serta mendukung setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan juga penuh perjuangan, dan senantiasa selalu mendoakanku dengan tulus dan ikhlas untuk keberhaslanku.
2. Ibu keduaku Ibu Tumirah yang ikut serta mendoakan keberhasilanku dan melanjutkan perjuangan almarhumah Ibundaku bersama Ayahandaku tercinta.
3. Adik-Adikku tersayang Ari Susanto, Rido Sandra, Nova dan Lisa yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Sanak familiku yang selalu memberikan dukungan dan selalu menanti keberhasilanku.



5. Sahabat-Sahabat seperjuangan Novita Sari, Rizki Kurniawati, Yoni Nasution, Joni Iskandar dan Irawansyah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Keluarga Besar UKK KSR PMI Unit UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Jurusan Jinayah Siyash angkatan 2012 yang saling memberikan motivasi dan seluruh Dosen yang selalu Ikhlas memberikan Ilmunya, semoga bermanfaat baik didunia maupun di akhirat.
8. Sahabatku tercinta Umi Kartika seorang wanita yang selalu ceria setiap hari dan selalu memberikan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan Karunianya kepada penulis, dan selalu senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa” walaupun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselsaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tinggi nya kepada:

1. Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung Dr.H.Moh.Mukri, M.Ag.
2. Bapak Dr. Khairuddin, S.H Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H Selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Frenki, M.Si Selaku Sekretaris Jurusan.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag dan Eko Hidayat, S.Sos., M.H Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbang pikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.

7. Perangkat Desa, Ketua BPD dan anggota BPD Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit kabupaten Lampung barat dan masyarakat yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam mengumpulkan data ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya sehingga laporan penelitian ini akan lebih baik dan sempurna.

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini berapapun kecil kiranya dapat memberikan masukan dalam upaya praktek memerintah Desa di tengah masyarakat pedesaan sesuai dengan syariat islam dan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kesejahteraan. Amiin.

Bandar Lampung, 22 Maret 2017

Penulis

,

**Yusep Pebriyansah**  
**Npm: 1221020040**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
1. Alasan Objektif .....	2
2. Alasan Subjektif .....	2
C. Latar Belakang .....	2
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Jenis Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Sifat penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Metode Pengelolaan Data .....	14
5. Metode Analisis Data.....	15
G. Populasi dan Sampel .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fiqh Siyasah .....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	17
2. Ruang Lingkup Fiqh siyasah dusturiyah.....	18

3. Asas-Asas siyasah Syariah.....	21
4. Etika Politik Dalam Islam.....	26
B. Desa.....	32
1. Pengertian Desa.....	32
2. Pemerintahan Desa.....	35
C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	41
1. Peranan BPD .....	41
2. Fungsi BPD .....	42
3. Wewenang BPD .....	42
4. Hak dan Kewajiban BPD .....	43
D. Kesejahteraan Masyarakat Desa .....	44
1. Pengertian Kesejahteraan.....	44
2. Ukuran Kesejahteraan .....	45
3. Kesejahteraan dalam Islam .....	47
4. Kesejahteraan dalam Sosial.....	49
5. Kriteria Kesejahteraan Masyarakat .....	51
E. Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pada Desa Bahway.....	55

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA BAHWAY**

A. Profil Daerah Penelitian .....	59
1. Sejarah Desa Bahway.....	59
2. Keadaan Geografis Desa Bahway .....	60
3. Keadaan Demografis Desa Bahway.....	62
4. Sosial Budaya Desa Bahway.....	64
5. Pemerintahan Desa Bahway.....	65
B. Gambaran Pemerintahan Desa Bahway .....	67
1. Visi dan Misi Desa Bahway .....	67
2. Struktur Pemerintahan Desa Bahway.....	67
C. Peranan dan Fungsi BPD di Desa Bahway .....	74



#### **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
dalam meningkatkan kesejahteraan Desa Bahway .....	82
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi Badan	
Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	
Desa.....	88

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis memasuki pembahasan mengenai skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul yang membahas tentang **“Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peranan Dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”** sebagai berikut :

- 1) *Fiqh siyash* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukannya.<sup>1</sup>
- 2) Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dari judul diatas adalah membahas mengenai tinjauan *fiqh siyash* mengenai fungsi dan peranan BPD dalam mewujudkan kesejahteraan di Desa Bahway Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.

---

<sup>1</sup>Djazuli, Fiqih Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003, h 27

## B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa hal yang memotivasi penulis dalam memilih dan membahas tema yaitu:

### 1. Alasan objektif :

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bahway untuk mengayomi adat istiadat setempat kurang diperhatikan. Kurang adanya sikap toleransi terhadap keanekaragaman masyarakat di Desa Bahway, dan aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan ke Badan Permusyawaratan Desa belum bersifat mewakili. Dilihat dari aspirasi masyarakat mengenai perbaikan akses jalan di Desa Bahway yang sampai saat ini belum juga terealisasi.

### 2. Alasan subjektif

Penelitian tentang tinjauan *fiqh fiyash* terhadap peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Jurusan Jinayah Siyasah UIN Raden Intan Lampung tempat penulis memperdalam keilmuan sehingga penulis dapat mengkaji lebih jauh.

## C. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa haruslah disadarkan dan diperhatikan oleh pemerintah desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga ada kemungkinan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Menurut Bintaro yang memandang Desa dari segi geografi, mendefinisikan Desa sebagai “Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”<sup>2</sup>

Pengertian Desa menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut penulis pengertian Desa adalah suatu wilayah dengan sekumpulan masyarakat yang melakukan kegiatan seperti bersosialisasi dan lainnya. Yang di pimpin oleh Kepala Desa dengan peraturan tertentu, dan batas-batas wilayah tertentu.

Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari Pusat, Daerah, dan Desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukan betapa lemahnya kedudukan

---

<sup>2</sup> Sadu Wasistiono dan MS, M.Irawan Tahrir, AP, M.Si, “*Prospek Pengembangan Desa*”, Bandung: Fokus Media, 2007, h 7



dan keberadaan Desa dalam konstalasi pemerintahan, padahal desalah yang menjadi peraturan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah di garis sebagai cita-cita bersama yaitu demokrasi.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>3</sup>

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.<sup>4</sup> Representasi adalah perbuatan mewakili, keadaan diwakili, perwakilan.<sup>5</sup>

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 04 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, PP RI Tahun 2016 Tentang Desa

<sup>4</sup> Sadu wasistiono dan M.Irwan Tahir, op.cit h 35

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>6</sup> Bambang Trisantono Soemantri, op. cit. h 13

Dasar-dasar *Fiqh Siyash* yang membahas tentang persoalan ini adalah:

1. Al-Qur'an
2. Hadis
3. Istinbath (Hukum *Siyash* menurut ulama *Fiqh*)

Sesuai dengan konteks Islam, bentuk pemerintahan dalam tata Negara islam adalah aparatur atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undangan yang telah dibuat.<sup>7</sup> Di dalam sejarah pemerintahan Islam, elemen yang pokok dalam demokrasi adalah sistem *syura*. *Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara *explicit* ditegaskan dalam al-qur'an.

Surat Ali Imran :159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah Kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, Jakarta : Gaya Media, 2001, h 138

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran: 159)<sup>8</sup>

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan, menjadikan urusan di antara kaum muslimin diselesaikan dengan musyawarah. Perintah dalam ayat itu ditujukan kepada Rasul ketika beliau memegang kepemimpinan. Tidak melakukan musyawarah adalah tindakan kesewenang-wenangan yang terlarang.

Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.<sup>9</sup>

Tugas BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat.
4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.<sup>10</sup>

BPD dalam penyelenggaraan Desa mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok yaitu:

---

<sup>8</sup>Departmen Agama RI, Al- Qur'an Terjemah al- aliyy, (Bandung: cv penerbit Diponegoro: 2006) h 56

<sup>9</sup>Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahrir, loc. Cit.

<sup>10</sup>Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahrir, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup>Bambang Trisantono Soemantri, *Loc.Cit.* h. 17

- a. Fungsi legislasi, pembuatan peraturan desa bersama Kepala Desa. Peraturan yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, harapan serta keterlibatan seluruh warga masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
- b. Fungsi anggaran, yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu BPD mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa serta pelaksanaan berbagai peraturan atau ketentuan hukum lainnya.<sup>11</sup>

Keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa BPD memiliki kedudukan hukum yang terkuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Pemerintah Desa.

Perwujudan dari otonomi Desa maka pemerintahan di Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintahan nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dijelaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat, partisipasi, dan pemberdayaan menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan otonomi desa, oleh karena itu pemerintahan desa mempunyai peranan yang penting untuk menggali

---



aset-aset, potensi-potensi yang ada di desa demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

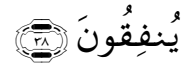
Peranan BPD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa di Desa Bahway Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, masih kurang aktif berdasarkan hasil observasi pra-penelitian di desa Bahway Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat . Peneliti menemukan fenomena bahwa tingkat penyelenggaran pemerintah desa yang demokratis dirasa belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut :

1. Tidak ada partisipasi dari masyarakat Bahway untuk melaksanakan gotong-royong.
2. Dana yang ada di BPD tidak disalurkan untuk membangun Desa.
3. Hampir tidak pernah atau jarang sekali di adakan musyawarah.
4. Aspirasi perbaikan akses jalan di Desa Bahway yang sampai saat ini belum juga di realisasikan oleh BPD.

Berdasarkan indikasi tersebut penulis berpendapat bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bahway untuk mengayomi adat istiadat setempat kurang diperhatikan karena lebih mengutamakan fungsi legislasi dan anggaran.

Firman Allah SWT. Dalam Q.S asy-syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ



“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Asy Syura: 38)

Badan Permusyawaratan Desa yang ideal adalah Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang.

Perekonomian daerah berbasis pertanian, kepariwisataan, inovasi teknologi, dengan fokus utama pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam serta energi baru dan terbarukan yang berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan iptek, kepemudaan serta kesejahteraan sosial.

Visi dan Misi Desa Bahway adalah sebagai berikut :

1. **Visi:** Terwujudnya Pekon yang aman, tertib, sejahtera dan berkualitas, dengan keunggulan potensi Daerah pertanian dan perkebunan pada Tahun 2016-2021.
2. **Misi:**
  - a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dengan memberdayakan potensi agrobisnis secara optimal.

- b. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM), di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan meningkatkan etos kerja dan mendorong kemandirian.
- c. Menjadikan Pekon Bahway sebagai pemasok komoditi pertanian dan pusat perdagangan di Lampung Barat.<sup>12</sup>

Bersama dengan Kepala Desa diharapkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa lebih nyata sebagai parlemen Desa untuk melaksanakan tugas utama yaitu musyawarah, mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di Desa. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Setelah meninjau latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di Desa Bahway, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa menurut undang-undang ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyash* terhadap peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa ?

---

<sup>12</sup> Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon( RPJM-PEKON)

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, di Desa Bahway, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan undang-undang ?
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>13</sup>

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan peranan dan fungsi BPD serta untuk memenuhi syarat akademik bagi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

---

<sup>13</sup> Rani Kautan, "Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Thesis", Bandung: Taruna Grafika, 2008, h. 38

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang selengkap mungkin serta dapat dipertanggung jawabkan. Dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.<sup>14</sup> Dimana data-data yang diambil merupakan hasil penelitian dari lapangan. Selain itu penulis juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>15</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif. Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian (yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang

---

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h 11

<sup>15</sup> Restu Kartiko Widi, "Asas Metodologi Penelitian", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h 84



berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum skunder, dan sumber bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan kesejahteraan. Berdasarkan teori maka bahan baku primer yang penulis gunakan adalah Al-Qur'an Hadist, pendapat-pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan Desa, peraturan Pemerintahan Desa.<sup>17</sup>

### b. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan

---

<sup>16</sup> Restu Kartiko Widi, Op.Cit.,

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 126

permasalahan yang dikaji, bahan hukum sekunder diperoleh dari referensi, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum sebagai perlengkapan kedua bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

dalam pengumpulan data bahan hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya dan disajikan dalam bentuk uraian.<sup>18</sup>

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data yang dikumpulkan berdasarkan sumber data yang diatas, maka langkah selanjutnya adalah penggolongan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Ammirudin dan Zainal Abidin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.<sup>19</sup>
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, atau buku-buku literatur lain yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

#### 5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan sosial, peneliti akan mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat. Setelah itu, peneliti menganalisa hasil dari perolehan data menggunakan kerangka teori yang sesuai, dari latar belakang masalah yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

### G. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian tentang tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

---

<sup>19</sup> Op.Cit., h.107

mensejahterakan masyarakat Desa di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Menurut Arikunto, populasi adalah total kumpulan dari objek yang bersangkutan dengan penelitian.<sup>20</sup> Sedangkan Setiyadi mengatakan “semua individu yang dapat menjadi target penelitian di sebut populasi”<sup>21</sup>. Jadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh penduduk Desa Bahway dengan jumlah penduduk 3186 Jiwa.

## 2. Sampel Penelitian

Menurut Arikunto, sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti.<sup>22</sup> Sedangkan Setiyadi berpendapat bahwa sampel penelitian adalah grup individu yang menunjukkan individu sebagai bagian dari target grup.<sup>23</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian adalah sebuah grup dari individu-individu yang menjadi bagian dari populasi yang di pilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Penulis mewawancari beberapa masyarakat desa Bahway dan Perangkat Desa Bahway serta anggota Badan Permusyawaratan Desa Bahway sebagai sampel penelitian.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian*, PT.RinekaCipta, Jakarta, 2006, h.130

<sup>21</sup> Bambang Setiyadi, *Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing, Pendekatan Kuantitatif dan Pendekatan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, h. 38

<sup>22</sup> *Ibid*, h.131

<sup>23</sup> Ag. Bambang Setiadi, *Op Cit*, h.141

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyash*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyash*

Kata *as-siyasah asy-syar'iyah* (politik syar'i), termasuk istilah *unitern* (terpakai dalam banyak istilah, tidak hanya pada satu istilah saja), bahkan banyak mengandung signifikasi. Oleh karena itu, "*as-siyasah*" telah digunakan pada lebih dari satu makna.<sup>24</sup>

*Fiqh Siyash* berasal dari dua kata bahasa arab, yakni *Fiqh* dan *Siyash*. kata *Fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum Islam. Secara etimologis, *Fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>25</sup>

Secara terminologis, *Fiqh* adalah pengetahuan hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di

---

<sup>24</sup> Muhammad bin Shalih Al-utsaimin, *Politik Islam: Ta'liq Siyasah Syar'iyah ibn Taimiyah*. Jakarta: Griya Ilmu, 2009, h, 11

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah : Pengantar Ilmu Politik Islam*, Pustaka Setia, Bandung: 2008, h 13

ambil dari sumber-sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah). Jadi, *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum Agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang di susun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.<sup>26</sup>

Menurut Ibn 'Aqil *Siyash* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada *kemaslahatan* dan lebih jauh dari *kemafsadatan*, sekalipun Rasulullah SAW. tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. tidak menentukan.<sup>27</sup>

Menurut Ibn 'Abid Al-Diin, *Siyash* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir *siyash* berasal dari para pemegang kekuasaan (para *sulhan* dan *araja*) bukan dari ulama, sedangkan secara batin *siyash* berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>28</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyash Dusturiyah*

Permasalahan di dalam *fiqh siyash dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. *Fiqh siyash dusturiyah*

---

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, Loc.Cit

<sup>27</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Jakarta: 2003, h. 27

<sup>28</sup> Djazuli., Loc. Cit



membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip Agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>29</sup>

kajian-kajian *fiqh siyash dusturiyah* adalah sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan imamah, hak dan kewajian.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan haknya.
4. Persoalan *ba'iat*.
5. Persoalan *waliyul ahdi*.
6. Persoalan perwakilan.
7. Persoalan *ahlul halli wal atqdi*.
8. Persoalan *wuzarah* dan perbandingannya.

Dari sisi lain *fiqh siyash dusturiyah* ini dibagi menjadi:

- a. Bidang *siyash tasri'iyah*, termasuk di dalam nya persoalan ahlul halli wal atqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslimin didalam satu Negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *siyash tanfidziyah* termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.

---

<sup>29</sup> Djazuli, Op.Cit., h. 47

a) *Imamah*

Pada umumnya, kata-kata *imam* menunjukan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum.

Didalam hadis pun *imam* itu ada yang baik dan ada yang buruk, dan *imam* yang baik adalah *imam* yang mencintai dan mendoakan rakyatnya serta dicintai dan didoakan oleh rakyatnya, sedangkan *imam* yang buruk adalah *imam* yang membenci rakyatnya dan dibenci serta dilaknat oleh rakyatnya.

1) Hak hak *imam*

Al-mawardi menyebut dua hak *imam* yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta *baitul-mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut sesuai kedudukan sebagai *imam*.

b) *Bai'ah*

*Bai'ah* adalah pengakuan mematuhi dan menaati imam yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.

c) *Wuzarah*

Al-mawardi menjelaskan arti *wuzarah* dari segi bahasa yaitu pertama, *wuzarah* diambil dari kata *al-wizru*, yang artinya beban,

karna *wazir* memikul beban kepala Negara. Kedua, diambil dari kata *al-wazar* yang artinya tempat kembali/lari karena kepala Negara selalu kembali kepada pemikiran/pendapat dan pertolongan *wazirnya*. Ketiga diambil dari kata *al-azru* yang arti punggung karna kepala Negara dikuatkan didukung oleh *wazirnya*, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggung.

d) *Waliy al-ahdi* (sumber kekuasaan dan kriteria *imam*)

*Imamah* itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: pertama dari pemilihan *ahl al-hall wa al-aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) *imam* yang sebelumnya.

c. Bidang *siyash qadllaiyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.

d. Bidang *siyash idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>30</sup>

### 3. Asas-Asas *Siyasah Syariah*

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu Pemerintahan dan Negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupannya yang wajar. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk

---

<sup>30</sup> Djazuli, Op.Cit., h. 49-60

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, secara umum, tugas pokok Pemerintahan atau Penguasa Daerah adalah memberikan perlakuan adil kepada setiap warganya tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka, untuk mengemban Amanah tersebut seorang pemimpin memerlukan konstitusi, hukum, etika, dan lembaga-lembaga yang tepat dengan para aparatur yang selalu semangat untuk melayani kepentingan umum sebagai dasar dari motivasi mereka memilih karir di bidang kepemimpinan.<sup>32</sup>

Menurut Syaukani, melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi Negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus di pegang, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi Negara yang baik harus memiliki dasar hukum (ada peraturan tertulis yang melandasinya). Legalitas yang di terapkan sangat bergantung pada *rezim* yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana dalam konsepsi politik islam yang dulu dicita-citakan kaum

---

<sup>31</sup>Beni Ahmad Saebani, Op.Cit., h 121

<sup>32</sup>Loc.Cit.,

santri bahwa *syari'at* merupakan panglima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>33</sup>

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan suatu bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/administrasi Negara dan merupakan suatu bagian yang penting sekali bagi perwujudan pemerintahan Negara dalam arti luas. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara harus berdasarkan:

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam Pemerintahan.
2. Perencanaan dalam pembangunan.
3. Pertanggung jawaban, baik oleh pejabat maupun oleh pemerintahan.
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat.
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan.
6. Keadilan tata usaha/administrasi Negara.
7. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>34</sup>

Suyuti Pulungan menyebutkan bahwa dasar dari Al-Qur'an yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga Negara dalam *siyash*, di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Beni Ahmad saebani, Ibid., h 123

<sup>34</sup> Loc.Cit.,

a. Kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT.

Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada ulil amri di antara orang-orang yang beriman, selama ulil amri tidak memerintahkan maksiat kepada Allah SWT.

Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 59:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (Pemegang kekuasaan) di antara kamu.”  
(Q.S. An-Nisa:59)<sup>35</sup>

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antar manusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semua.

Diterangkan dalam surat an-Nisa ayat 58:

---

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani, Ibid., h. 124



﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa:58)<sup>36</sup>

#### c. Prinsip Persamaan (*Musawah*)

Semua warga Negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa,

Dalam surat Al-Hujarat Allah SWT. Berfirman:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُونَ ﴾

“Sesungguhnya Orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu diamankanlah antara kedua saudara (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat.” (Q.S. Al-Hujarat:10)<sup>37</sup>

#### d. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para Pemimpin Negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepas diri dari sikap

<sup>36</sup>Loc.Cit.,

<sup>37</sup>Beni Ahmad Saebani, Ibid., h. 125

mengklaim kebenaran sendiri. Allah SWT. berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syura:38)<sup>38</sup>

Perlunya musyawarah disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda
- Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda
- Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda
- Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda<sup>39</sup>

#### 4. Etika Politik dalam Islam

Sebagai sistem ajaran yang terbuka, Islam selalu menekankan fungsi kritisnya dalam memisahkan sisi positif dan sisi negatif dari berbagai watak ideologi. Beberapa prinsip etika politik dalam islam yaitu meliputi:

##### a. Kekuasaan sebagai amanah

Dalam kontek kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Sebab pada prinsipnya kekuasaan atau kepemimpinan adalah suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan kewenangan orang-

---

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, Ibid., h. 126

<sup>39</sup> Loc.Cit.,

orang yang dipimpinnya. Islam secara tegas melarang terhadap para pemegang kekuasaan melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya. Sebab apapun yang dilakukan oleh seorang penguasa atau pemimpin, kelak akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT.<sup>40</sup>

b. Musyawarah

Pentingnya musyawarah dalam Islam adalah upaya untuk mencari sebuah pandangan obyektif dalam sebuah perkara, sehingga pengambilan keputusannya dapat dilakukan secara bulat atau dengan resiko yang relatif kecil. Pengambilan keputusan secara mufakat, dalam tradisi Islam, dikenal juga upaya pengambilan keputusan secara bersama-sama dan berdasarkan suara terbanyak.

Sifat pengambilan keputusan dalam musyawarah hanya dilakukan untuk hal-hal kebaikan (ma'ruf) dan Islam melarang pengambilan keputusan untuk hal-hal yang buruk (munkar).<sup>41</sup>

c. Keadilan Sosial

Ajaran Islam mengandung sosial etika bermasyarakat adalah menegakkan keadilan terhadap sesama manusia. Islam tidak menghendaki

---

<sup>40</sup> Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Lampung: 2015, h. 49

<sup>41</sup> Sidi Ritahudin, *Ibid.*, 51

bahwa dunia beserta isinya hanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat sementara mereka yang lemah tidak mendapatkan apa-apa.<sup>42</sup>

d. Persamaan

Dalam Islam prinsip persamaan bermakna mencakup segala bidang yaitu sosial, ekonomi, sosial politik budaya, dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum misalnya, Islam memberikan jaminan bagi semua orang tanpa memandang kedudukan dan strata sosial. Prinsip persamaan dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Hujarat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujarat:13)<sup>43</sup>

e. Pengakuan dan Perlindungan terhadap HAM

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70 menjelaskan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

<sup>42</sup> Loc.Cit.,

<sup>43</sup> Sidi Ritahudin, Ibid., h 52

“Dan sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam Kami tebarkan mereka di darat dan dilaut serta Kami anugrahi mereka rezki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari pada makhluk yang telah kami ciptakan”. (Q.S. Al-Isra: 70)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai anak keturunan Nabi Adam memiliki kemuliaan dengan berbagai kelebihanannya bila dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Hasbi As-Shidiqie membagi kemuliaan menjadi tiga:

- 1) Kemuliaan pribadi (*Karamah fardiyayaha*), yaitu masyarakat dilindungi hak-hak pribadi dan hartanya.
- 2) Kemuliaan masyarakat (*Karamah Ijtimaiyyah*), yaitu status persamaan manusia dijamin sepenuhnya.
- 3) Kemuliaan politik (*Karamah Siyasiyyah*) yaitu meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap warga Negara tanpa pengecualian.

Praktek politik dalam Islam, baik yang dilaksanakan pada masa Rasulullah, maupun pada masa sesudahnya, Islam sangat *concern* terhadap prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut meliputi, persamaan manusia, martabat manusia, kebebasan manusia.<sup>44</sup>

#### f. Peradilan Bebas

Prinsip peradilan bebas banyak ditegaskan dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah Q.S. An-Nisa:57:

---

<sup>44</sup>Loc.Cit.,

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا



“Bila kamu menetapkan hukum diantara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil”.(Q.S. An-Nisa: 57)

Dengan demikian setiap putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan yang bebas dari segala intervensi kekuasaan. Tidak ada pembeda seseorang karena kedudukannya dimasyarakat yang tinggi dengan seseorang yang miskin tetapi keadilan harus ditegaskan atas semua kepentingan golongan, kelompok sosial tertentu, agama, maupun keluarga.<sup>45</sup>

#### g. Perdamaian dan Keselamatan

Contoh paling sederhana yang membuktikan bahwa Islam adalah Agama perdamaian adalah anjuran mengucapkan salam ketika bertemu dengan seseorang. Kalimat salam “assalamualaikum warohmatullahi wabarakatu” yang mengandung arti bahwa semoga Allah selalu melimpahkan keselamatan dan kerahmatan sehingga tidak ada bencana menghampirinya.

Al-Qur'an hanya mengizinkan tindakan kekerasan atau perang apabila pihak lain yang memulai serangan terhadap umat Islam. Disamping itu

---

<sup>45</sup> Sidi Ritaudin, Ibid., h. 53



peperangan wajib dihentikan jika pihak musuh ingin berdamai sebagaimana ketentuan yang di gariskan dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa Agama Islam lebih mementingkan perdamaian diantara sesama manusia dan antar bangsa.<sup>46</sup>

#### h. Prinsip Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam Islam adalah kesejahteraan yang tidak hanya mencangkup kesejahteraan lahir, tetapi juga batin untuk mencapai ridha Allah. Sehingga kaitan Ibadah spiritual selalu di gandengkan dengan persoalan kepedulian terhadap ketimpangan sosial.

Al-Qur'an selalu mengingatkan bahwa Ibadah selalu ada kaitannya dengan aspek sosial, sebaliknya apa yang didapat manusia (rezeki) selalu diingatkan bahwa didalam rezeki itu ada hak orang lain yang membutuhkan dan harus di tunaikan.<sup>47</sup>

#### i. Prinsip Ketaatan Rakyat

Stabilitas Nasional tidak akan mungkin tercapai jika rakyat atau Daerah sering memberontak terhadap Pemerintahan Pusat. Dalam hal ini ketaatan rakyat terhadap pemerintahan bersifat wajib sejauh mana ketaatan tersebut menuju pada kebenaran.

Sebagai elemen dari suatu bangsa (Negara), maka rakyat memiliki posisi yang sangat kuat dan dapat *memakzulkan* pemerintahan yang *zolim*.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 54

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 55

Rakyat adalah pemegang kedaulatan atas sebuah sistem pemerintahan. Pemerintahan yang berjalan di atas sistem yang tidak dikehendaki oleh rakyat boleh di tentang dan di lawan. Membiarkannya berarti telah membiarkan kezaliman hidup di muka bumi, dan itu dilarang keras dalam Islam.<sup>48</sup>

## B. Desa

### 1. Pengertian Desa

Membicarakan tentang “Desa” di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian Desa secara *sosiologis*, yaitu yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif *homogeny*, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian *sosiologis* tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 56

<sup>49</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov, 2013. h.

yang di sediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>50</sup>

Ketiga, pengertian secara politik, dimana “Desa” sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara.<sup>51</sup>

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat 7 yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggara pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti, bahwa pasal 18 ayat 7 UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Indonesia.

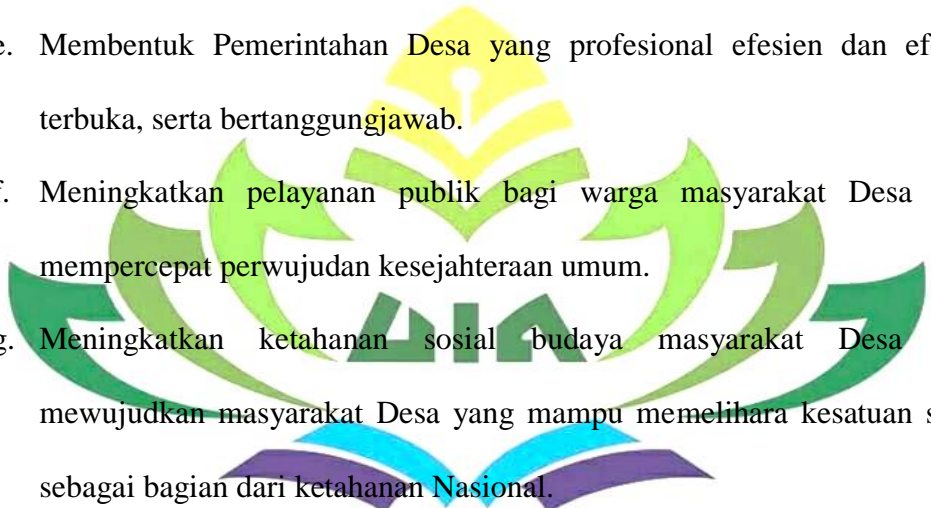
Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan Desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>50</sup> Mashuri Maschab, *ibid.* h. 1

<sup>51</sup> Mashuri Maschab, *ibid.* h. 2

- 
- b. Memberikan penjelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
  - c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
  - d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan dan aset Desa guna kesejahteraan bersama.
  - e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.
  - f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
  - g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan Nasional.
  - h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>52</sup>

Konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom) dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalanya desa disebut memiliki otonom asli, yang berbeda dengan daerah otonom

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

lainnya seperti Kabupaten, Keresidenan, dan Provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintah pusat atau pemerintah Nasional.<sup>53</sup>

## 2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.<sup>54</sup>

Adapun yang di maksud pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Tentang Desa Pasal 1 ayat 6 yaitu penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di bentuk atas asas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.<sup>55</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini terdapat atau di pertegas

---


<sup>53</sup> Mashuri Maschab, *ibid.* h. 2

<sup>54</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Ibid.* h. 7

<sup>55</sup> Dr. Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta: Tahun 1991, h. 91

dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni pada pasal 1 ayat Satu “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>56</sup>

a. Kepala Desa



Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan “urusan pemerintahan”, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, “urusan pembangunan”, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan “urusan kemasyarakatan”, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.<sup>57</sup>

Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

---

<sup>56</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang desa*

<sup>57</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2011, h. 7



- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- 3) Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Membina perekonomian Desa.
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan Desa (memfasilitasi dalam pelestarian pembangunan di Desa).
- 8) Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

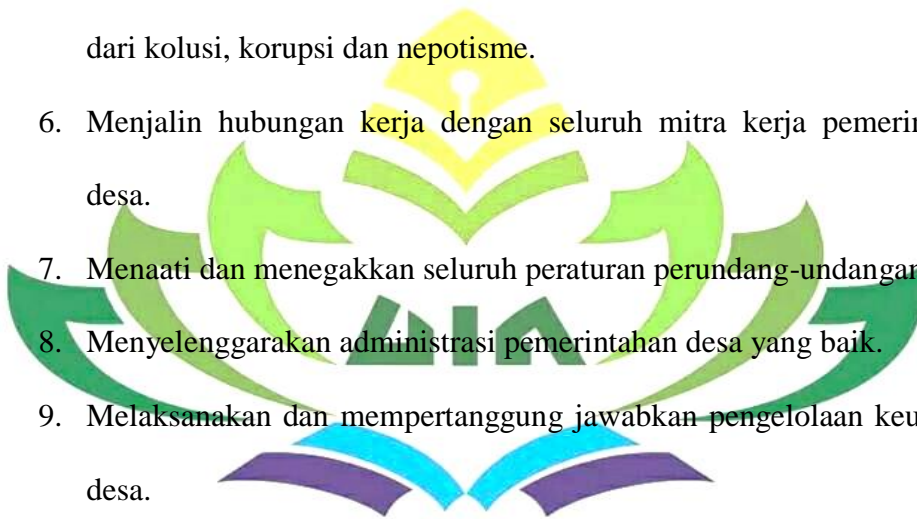
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

---

<sup>58</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *ibid.* h. 7

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat.
3. Memelihara kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.



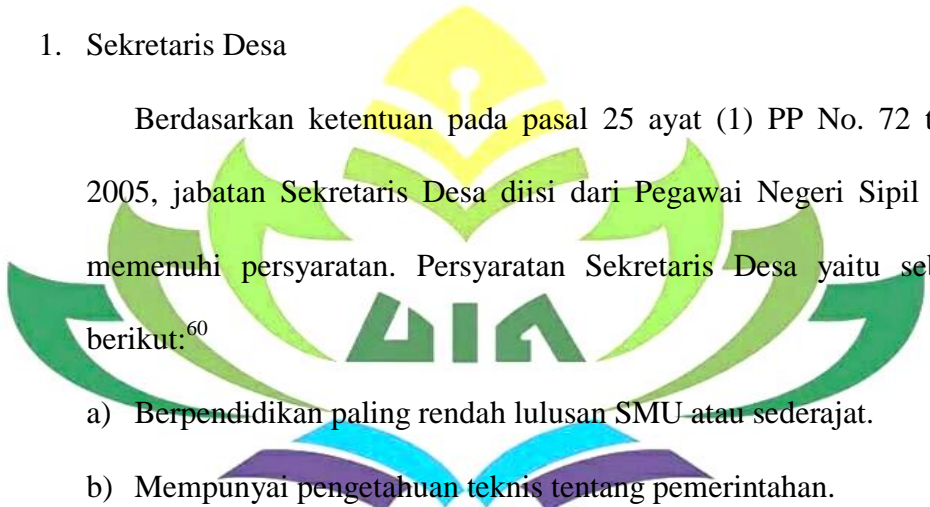
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>59</sup>

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

1. Sekretaris Desa

Berdasarkan ketentuan pada pasal 25 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005, jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Persyaratan Sekretaris Desa yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 
- a) Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat.
  - b) Mempunyai pengetahuan teknis tentang pemerintahan.
  - c) Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran.
  - d) Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan.
  - e) Memahami sosial budaya masyarakat setempat.
  - f) Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Dengan demikian, selain memenuhi persyaratan-persyaratan formal Pegawai Negeri Sipil berdasarkan undang-undang

---

<sup>59</sup> Bambang Trisan tondo Soemantri, *ibid.* h. 8

<sup>60</sup> *ibid.* h. 11

kepegawaian, maka Sekretaris Desa juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan non formal, maka Sekretaris Desa di angkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.<sup>61</sup>

## 2. Pelaksana Teknis Lapangan

Pelaksana Teknis Lapangan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi.<sup>62</sup>

## 3. Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas pemerintahan. Jumlah unsur kewilayahan ditentukan secara proporsional antara unsur kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *ibid*

<sup>62</sup> Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang STOK Pemerintahan” (On-line), tersedia di <https://bulelengkab.go.id/bankdata/permendagri.htm> (14 Februari 2018)

<sup>63</sup> Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang STOK Pemerintahan” (On-line), tersedia di <https://bulelengkab.go.id/bankdata/permendagri.htm> (14 Februari 2018)

## C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

### 1. Peranan BPD

Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dengan pertimbangan BPD. Dalam pemerintahan Desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD. Kedudukan BPD di desa adalah sebagai mitra kerja Kepala Desa. Pertanggung jawaban Kepala Desa ini yang selanjutnya menjadi tugas dan wewenang BPD. Dalam melaksanakan tugasnya BPD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun peran dari BPD adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa.

BPD bersama Kepala Desa membahas rancangan peraturan Desa yang akan di tetapkan, kepala Desa tidak dapat begitu saja mengambil sebuah kebijakan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan terlebih dahulu dari BPD.

- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>64</sup>

BPD berperan menggali, menghimpun dan merumuskan aspirasi masyarakat, dan kemudian menyalurkan aspirasi tersebut. Aspirasi dari masyarakat bisa didapat oleh BPD dengan melakukan musyawarah dengan

---

<sup>64</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2015

masyarakat desa. Aspirasi masyarakat bisa diberikan kapan saja kepada anggota BPD, setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka aspirasi itu di tampung dan di olah oleh anggota BPD dan kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintahan Desa.

## **2. Fungsi BPD**

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>65</sup>

## **3. Wewenang BPD**

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyusun tata tertib BPD.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Undang – Undang RI No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016, *tentang Desa*



#### 4. Hak dan Kewajiban BPD

BPD mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Meminta keterangan Kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat<sup>67</sup>

Anggota BPD mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Memperoleh tunjangan.<sup>68</sup>

Sedangkan anggota BPD mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

---

<sup>66</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Op.Cit.* h. 14

<sup>67</sup> Bambang Trisantono soemantri, *Loc.Cit*

<sup>68</sup> Bambang Trisantono soemantri, *Loc.Cit*

- e. Memproses pemilihan Kepala Desa (membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak di pilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk di sahkan menjadi Kepala Desa terpilih).
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.<sup>69</sup>

#### **D. Kesejahteraan Masyarakat Desa**

##### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Bambang Trisantono Soemsantri, *Loc. Cit*

<sup>70</sup> Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, STAIN Kudus, h 383.

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.<sup>71</sup>

Kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarmita adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan keamanan, kemaslahatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi yang baik, selamat, dan sehat dari masyarakat serta terbebas dari jeratan kemiskinan.

## **2. Ukuran Kesejahteraan**

Pengukuran tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari indikator-indikator perkembangan kesejahteraan masyarakat, antara lain: kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi lainnya, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial.<sup>72</sup>

Di antara aspek yang sering digunakan sebagai indikator ukuran kesejahteraan adalah pendapatan, populasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya.<sup>73</sup>

Peningkatan kesejahteraan diwilayah pedesaan dibutuhkan peran penting dari Kepala Desa dalam pembangunan Desa, pelayanan yang baik,

---

<sup>71</sup>Ibid, h.384

<sup>72</sup> Riyadi, et.al., *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2011 (welfare indicator 2015)*, h 63-142

<sup>73</sup>Op.Cit, h. 382

pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan pembangunan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat desa di ukur dari :

a. Kependudukan

Kependudukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian dan lain-lain hingga ketahanan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya serta politik.

b. Kesehatan dan gizi

Tersedia nya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan tercukupinya gizi keluarga.

c. Pendidikan

Tersedianya tempat untuk menuntut ilmu seperti: sekolahan (Sd,SMP, SMA, perguruan tinggi), dan TPA.

d. Ekonomi dan pendapatan

Tersedianya pasar desa.

e. Perumahan

Mempunyai tempat tinggal yang layak huni.

---

<sup>74</sup>Pemikiran Penulis

### 3. Kesejahteraan Dalam Islam

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.<sup>75</sup>

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4,



فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”. (Q.S. Quraisy: 3-4)

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat kesimpulan bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut. Ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam

---

<sup>75</sup> Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, STAIN Kudus, h 388

penghambaan (Ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).<sup>76</sup>

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh Agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraaisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.<sup>77</sup>

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai, kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan. Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

---

<sup>76</sup> Ibid., h 390

<sup>77</sup> Loc.cit



“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S. An-Nisa: 9)<sup>78</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa didalam islam ada tiga indikator kesejahteraan yaitu:

- a. Melakukan ibadah
- b. Hilangnya rasa lapar
- c. Terciptanya rasa aman bagi masyarakat.

#### **4. Kesejahteraan dalam Sosial**

Menurut Spieker kesejahteraan sosial menunjuk pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh Negara atau jenis-jenis tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang di tujukan bagi orang miskin. Maka kesejahteraan sosial memfokuskan pada tiga bidang, yaitu: pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga hal tersebut dilakukan dengan berdasar pada kebijakan atau strategi yang bermatra pencegahan, penyembuhan dan pengembangan.<sup>79</sup>

Di Indonesia konsep kesejahteraan sosial telah lama di kenal. Ia telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang RI Nomor 6 tahun

---

<sup>78</sup> Ibid., h 391

<sup>79</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 2009, h. 9

1974 tentang ketentuan-ketentuan kesejahteraan sosial, misalnya, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai:

“ suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.”<sup>80</sup>

Menurut undang-undang No. 11 Tahun 2000, tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan mencakup tiga konsep yaitu:

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
- b. Instansi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

---

<sup>80</sup>Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang *ketentuan-ketentuan kesejahteraan sosial*

- c. Aktivitas, yaitu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.<sup>81</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa kesejahteraan sosial masyarakat dapat diukur melalui:

- a. Pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

- b. Perlindungan sosial.

Suatu langkah kebijakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman.

- c. Jaminan sosial

Pemberian bantuan terhadap rakyat miskin.

- d. Pemberdayaan masyarakat, contohnya seperti tersedianya lembaga seperti PKK dan lain-lain.

## 5. Kriteria Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badan Pusat statistika (BPS) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

1. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 yaitu:

- a. Tinggi ( $> \text{Rp.1000.000}$ )
- b. Sedang ( $\text{Rp.5000.000}$ )
- c. Rendah ( $< \text{Rp.5000.000}$ )

2. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 yaitu:

- a. Tinggi ( $> \text{Rp. 5000.000}$ )
- b. Sedang ( $\text{Rp.1000.000-Rp.5000.000}$ )
- c. Rendah ( $< \text{Rp.1000.000}$ )

3. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai.

Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantainya terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.

- b. Semi Permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes.

c. Non Permanen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.

4. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Lengkap
- b. Cukup
- c. Kurang

5. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Bagus (<25% sering sakit)
- b. Sedang (25-50% sering sakit)
- c. Kurang (>50% sering sakit)

6. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan dan alat kontrasepsi.

Dan 5 item tersebut kemudian akan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- a. Mudah
- b. Cukup
- c. Sulit

7. Indikator kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, dan proses penerimaannya. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Mudah
- b. Cukup
- c. Sulit

8. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri dari 3 item yaitu, ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Mudah
- b. Cukup
- c. sulit<sup>82</sup>

berdasarkan kriteria diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila:

- 1) Mempunyai pendapatan sedang atau tinggi

---

<sup>82</sup> Riyadi, et.al, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, 2015, Jakarta: Badan Pusat Statistik.



- 2) Pengeluaran yang sedang.
- 3) Memiliki tempat tinggal permanen atau semi prmanen.
- 4) Memiliki fasilitas tempat tinggal yang cukup.
- 5) Anggota keluarga yang jarang sakit.
- 6) Cukup mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 7) Cukup mudah untuk memasukan anak kejenjang pendidikan.
- 8) Cukup mudah untuk mendapatkan transportasi umum.

#### **E. Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pada Desa Bahway**

Dari hasil penelitian yang penulis teliti, pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sangatlah berpengaruh besar terhadap Desa Bahway, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Walaupun Pemerintah di Desa Bahway belumlah sepenuhnya memenuhi amanah.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diterbitkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa mengacu pada undang-undang terbaru tersebut. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada bagian kesatu pasal 1 ayat 2, 3 dan 4 disebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan BPD. Kemudian dijelaskan lagi pada bagian kesatu pasal 25 “Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pada Bab 9 bagian kesatu pasal 78 tentang pembangunan Desa:

(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Bahway, penulis memperoleh informasi bahwa pada ayat ke (3) belum berjalan maksimal, karna masyarakat desa Bahway hampir tidak pernah melakukan gotongroyong, hal tersebut dikarenakan kurang terbukanya Kepala Desa dengan masyarakatnya.

Pada pasal 79 tentang perencanaan:

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

(2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Perencanaan pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pemerintah Desa Bahway menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana pembangunan tahunan Desa beserta peraturan Desa, yang terbentuk dalam sebuah buku.

Pada pasal 80 tentang pelaksanaan:

(1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Desa.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-groyong.

(3) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada

Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.

Pemerintah Desa Bahway belum sepenuhnya melaksanakan undang-undang nomor 6 bab 9 pasal 80 tentang pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan penulis menemukan minimnya pembangunan di Desa Bahway, seperti perbaikan dan pembangunan akses jalan, pembangunan pasar Desa yang belum tersedia, dan beberapa sarana lainnya.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA BAHWAY**

### **A. Profil Daerah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan luas wilayah 6.024 Ha/m2. Kata Bahway berasal dari Bahasa Lampung “Bah” yang berarti di bawah dan “way” yang artinya air, jadi Desa Bahway berarti di bawah air, dinamai Bahway karena pada tahun 1923 terjadi bencana alam yang membuat Desa Bahway terendam air.<sup>83</sup>

#### **1. Sejarah Desa Bahway**

Sejarah Desa Bahway dahulu terletak di bawah Gunung Pesagi, di pinggir sungai Way Rekuk yang sekarang dijadikan persawahan warga. Nama Bahway sendiri diambil dari kondisi alamnya yaitu desa yang di atasnya terdapat gunung yang dikenal dengan Gunung Pesagi, dan di gunung tersebut terdapat sumber mata air yang dinamai Way Rekuk.<sup>84</sup>

Pada tahun 1923 terjadi bencana alam yaitu banjir besar yang mengakibatkan Desa Bahway hancur total, dan warga masyarakat yang selamat dari bencana tersebut mengungsi dan menetap di umbul kuwaw yang sekarang dikenal dengan dengan nama Bahway, yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa bernama H. Mad Amin dari tahun 1960-1962, kemudian diganti

---

<sup>83</sup> Azhar Efendi, Wawancara dengan Penulis, Kantor Desa Bahway, Lampung Barat, 08 Oktober 2017.

<sup>84</sup> Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM-PEKON) Tahun 2016-2021

oleh Arbi dari tahun 1953-1960 dan pada tahun 1960 ada peraturan Pemerintahan yang menetapkan bahwa Desa Bahway menginduk pada Desa Sukarame yang waktu itu dikepalai oleh Bahtim dan Desa Bahway di pimpin oleh Kepala Suku yaitu Mersan dari tahun 1960-1962. Kemudian digantikan oleh Merakh 1962-1975 dan dari tahun 1975-1980 Merakh diangkat menjadi Kepala Desa setelah itu diganti oleh Sofyan dari tahun 1980-1983.<sup>85</sup>

Pada Tahun yang sama digantikan oleh Supardin Saputra pada tahun 1983-1999, lebih kurang 13 tahun kemudian digantikan oleh anaknya Agusniar Saputra pada tahun 1999-2004. Pada tahun 2004 diadakan pemilihan kepala Desa dengan dua calon kepala Desa yakni 1. Agusniar Saputra, 2. Indra Makmur ZR. Dan ditetapkan sebagai Kepala Desa Bahway periode 2004-2008 dan dimulai bulan Mei 2009 dipimpin oleh plt yaitu Suhendar, dan pada pemilihan berikutnya dimenangkan oleh Kepala Desa Perempuan yaitu Sumiyati sampai sekarang.<sup>86</sup>

## **2. Keadaan Geografis Desa Bahway**

Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Desa yang memiliki letak jauh dari Ibu Kota Kecamatan sehingga jauh dari pusat Kota Kabupaten Lampung Barat.

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*



Desa Bahway merupakan salah satu Desa dari 10 Desa dan dua Kelurahan yang ada di wilayah Balik Bukit.<sup>87</sup>

Adapun batas-batas wilayah Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Raya OKU Selatan.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukarame.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau.<sup>88</sup>

Desa Bahway memiliki luas wilayah 192.700 m<sup>2</sup>, dan terdiri dari 10 Dusun sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Nama-Nama Kepala Dusun Desa Bahway**

NO	NAMA KEPALA DUSUN	NAMA DUSUN
1.	Rizani	Bahway
2.	Ihwan	Pelita Jaya
3.	Warjo	Sinar Sunda
4.	Khotimah	Sarhum
5.	Aliyuddin	Jejawi
6.	M.Nurrohim	Selimbun Jaya
7.	Giono	Ramuan Jaya
8.	Saryono	Way Pematu
9.	Santoso	Salam Rejo
10.	Larso	Way Jurak

<sup>87</sup> *Ibid.* h. 5

<sup>88</sup> *Ibid*

11.	Supriyadi	Talang Sebaris
-----	-----------	----------------

Sumber Data: Profil Desa Bahway

### 3. Keadaan Demografis Desa Bahway

Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat di huni oleh berbagai suku seperti, Lampung, jawa, Sunda, dll. Penduduk Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berjumlah 3186 jiwa. Dari 3186 jiwa tersebut 1739 jiwa adalah kaum laki-laki dan 1447 jiwa adalah kaum perempuan.

**Table 3.2**  
**Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH JIWA
1.	Laki-Laki	1447 Jiwa
2.	Perempuan	1739 Jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>3186 Jiwa</b>

Sumber Data: Profil Desa Bahway

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Bahway lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.<sup>89</sup>

Dari segi Pendidikan, masyarakat Desa Bahway mayoritas berpendidikan, dan rata-rata diantaranya mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat SLTP, walaupun diantaranya masih terdapat masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, akan tetapi angka buta huruf di Desa

---

<sup>89</sup> Sumber Data dari Kantor Kepala Desa Bahway

Bahway dapat dikategorikan hampir tidak ada, rata-rata mereka mengenal dan mengenyam pendidikan.<sup>90</sup>

Masyarakat Bahway memiliki mata pencaharian yang bervariasi, yang dimana diantaranya mereka beramata pencaharian sebagai petani, baik itu petani kopi maupun sayur-sayuran, ada juga yang berprofesi sebagai peternak hewan, pedagang, dll. Apapun profesi yang digeluti, dan bagaimanapun cara mereka dalam bekerja dalam menjalani kehidupan, mereka memiliki rasa kebersamaan dalam menjalani kehidupan antar sesama.<sup>91</sup>

Masyarakat yang tinggal dilingkungan Desa Bahway, memiliki perbedaan dalam memeluk kepercayaan, yang diantaranya mereka memeluk agama Kristen, Khatolik, ataupun Protestan, dan memiliki kontak dalam menjalani kehidupan dengan umat muslim.<sup>92</sup> Untuk sarana peribadatan terdapat 6 buah mushola di Desa Bahway.<sup>93</sup>

**Table 3.3**  
**Klasifikasi Kepercayaan Masyarakat Bahway:**

NO	Agama	Jumlah
1.	Islam	3180 Orang
2.	Budha	10 Orang

---

<sup>90</sup>Op.Cit

<sup>91</sup>*Ibid* .

<sup>92</sup>*Ibid* .

<sup>93</sup> Profil Desa Bahway

Berdasarkan tabel tersebut dapat di simpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bahway beragama Islam.<sup>94</sup>

#### 4. Sosial Budaya Desa Bahway

Desa Bahway memiliki semboyan “lain ladang lain belalang” maksudnya adalah lain daerah lain pula kondisi sosial budayanya. Demikian pula halnya yang terjadi di Desa Bahway, dimana dari jumlah 3186 jiwa terbagi kedalam golongan umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, suku maupun agama yang berbeda-beda.<sup>95</sup>

Seperti desa-desa lainnya yang memiliki budaya, Desa Bahway pun memiliki budayanya sendiri, contohnya dalam pemerintahan, jika di desa lain pemimpin desa disebut Kepala Desa, namun di Desa Bahway sebutan pemimpin desa adalah Peratin, dan jika di desa lain dewan desa di sebut BPD (badan permusyawaratan desa) di desa bahway di sebut LHP (lembaga himpunan pekon).<sup>96</sup>

Menurut Edi Saputra salah satu masyarakat Desa Bahway, ia mengungkapkan bahwa sosial budaya masyarakat Desa Bahway sangat lah erat. Ada beberapa budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat Bahway, seperti “*Ninggam Pudak*” dimana masyarakat Desa Bahway beramai-ramai mendatangi rumah warga yang meninggal dunia untuk berbela sungkawa,

---

<sup>94</sup>Op.Cit. h.11

<sup>95</sup>*Ibid.* h. 8

<sup>96</sup> Azhar Effendi, Wawancara Dengan Penulis, Kantor Desa Bahway, Lampung Barat, 08 Oktober 2017

lalu “*Hahayaman*” biasanya di adakan jika ada seseorang yang meninggal, tujuannya untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan, biasanya Hahayaman diadakan dimalam pertama setelah tahlilan.<sup>97</sup>

Didesa Bahway biasanya setiap hari-hari besar seperti hari raya idul fitri dan hari-hari besar lainnya, masyarakat Desa Bahway mengadakan “*sakuraan*” acara ini dilakukan sebagai rasa syukur masyarakat Desa kepada sang pencipta. Ada juga “*Nyambai*” yaitu suatu acara yang diadakan ketika ada seseorang yang menikah, biasanya acara ini diadakan oleh pemuda pemudi Desa Bahway.

## **5. Pemerintahan Desa Bahway**

Pemerintahan Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat Desa, Pemerintahan Desa Bahway dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan sebutan Peratin di Desa Bahway yang ditunjuk melalui pemilihan Peratin langsung dengan sistem demokrasi.

Pelaksanaan kegiatan administrasi Pemerintahan Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, seorang Kepala Desa dibantu oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes), dan beberapa orang Kepala Urusan (Kaur). Kepala Desa merupakan eksekutif dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa dan dilakukan pengawasan oleh legislatif desa yang

---

<sup>97</sup> Edi Saputra, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 09 Oktober 2017.

disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Bahway di sebut Lembaga Himpunan Pekon (LHP).<sup>98</sup>

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Desa Bahway menggunakan sistem Pemerintahan Umum melalui pelayanan beberapa sektor, misalnya pelayanan dalam hal mengurus surat-surat dokumen kependudukan, pelayanan dalam hal perizinan kegiatan, maupun terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat itu sendiri.<sup>99</sup>

**Table 3.3**  
**Pemerintahan Umum Di Desa Bahway**

NO	URAIAN	KEBERADAAN		KETERANGAN
		Ada	Tidak	
1.	Pelayanan Kependudukan	Ada		
2.	Pemukaman	Ada		
3.	Perizinan	Ada		
4.	Pasar Tradisional		Tidak	
5.	Ketentraman dan Ketertiban	Ada		

Berdasarkan tabel di atas penulis berpendapat bahwa pemerintahan Desa Bahway masih memiliki beberapa kekurangan, seperti pelayan pembangunan yang tidak tersedia, tidak adanya pasar tradisional dan lain sebagainya.

<sup>98</sup> Sumber Data dari Kantor Kepala Desa

<sup>99</sup> Ibid.,

## **B. Gambaran Pemerintahan Desa Bahway**

### **1. Visi dan Misi Desa Bahway**

#### **a. Visi**

Terwujudnya pekon yang aman, tertib, damai, sejahtera dan berkualitas, dengan keunggulan potensi daerah pertanian pada tahun 2016-2021.

#### **b. Misi**

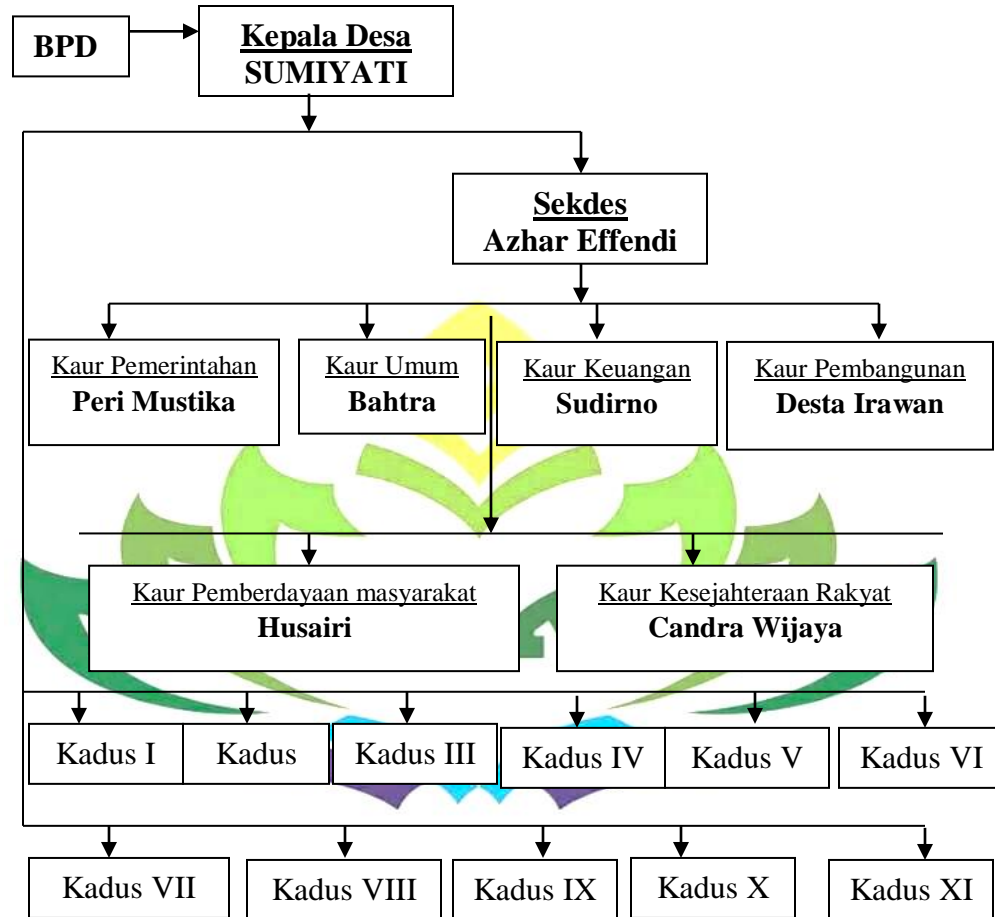
1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dengan memberdayakan potensi agrobisnis secara optimal.
2. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan meningkatkan etos kerja dan mendorong kemandirian.
3. Menjadikan Pekon/Desa Bahway sebagai pemasok komoditi Pertanian untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

### **2. Struktur Pemerintahan Desa Bahway**

Desa Bahway dipimpin oleh seorang Peratin perempuan yang bernama Sumiyati dan di damping oleh Sekretaris Desa yang bernama Azhar Effendi, dan beberapa Kepala Urusan.



a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bahway



Sumber Data :Sumber Data Kantor Desa

Adapun uraian tugas dari perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Kepala Desa dalam melakukan pekerjaannya bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Sekretaris Desa merupakan wakil dari Kepala Desa yang bertugas dalam membantu kerja Kepala Desa dalam administrasi pemerintahan.

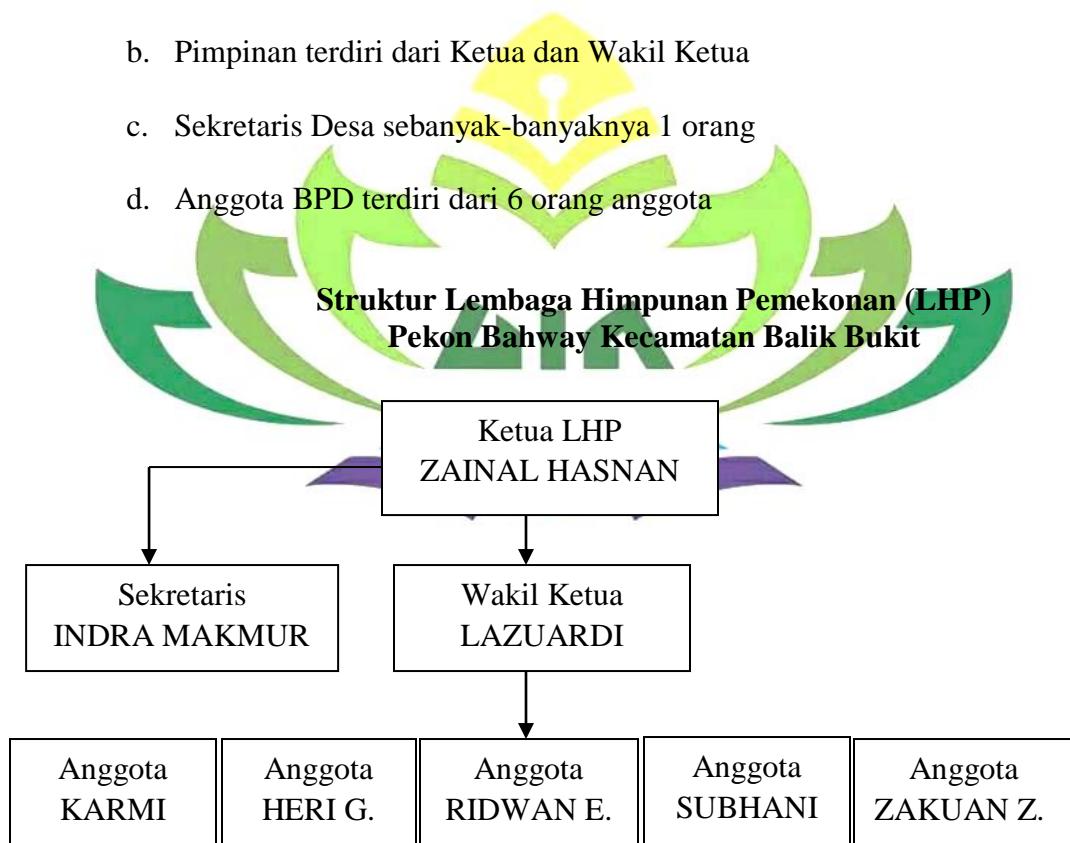
- 3) Kepala urusan (Kaur) pemerintahan yang bertanggungjawab langsung kepada kepala desa dan mempunyai tugas pokok dalam administrasi bidang pemerintahan.
- 4) Kepala urusan (Kaur) pembangunan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan pembangunan Desa.
- 5) Kepala urusan (Kaur) keuangan yang bertanggungjawab langsung kepada kepala desa dan mempunyai tugas pokok mengatur keuangan Desa.
- 6) Kepala urusan (Kaur) pemberdayaan masyarakat yang bertanggungjawab langsung kepada kepala desa mempunyai tugas dalam mengembangkan masyarakat desa.
- 7) Kepala urusan (Kaur) kesejahteraan masyarakat desa bertanggungjawab langsung kepada kepala desa dan mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam mensejahterakan masyarakat desa.
- 8) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga tertinggi Desa yang mempunyai tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa dan melakukan kerjasama dengan kepala desa dalam urusan pembangunan Desa.
- 9) Kepala Dusun (Kadus) merupakan wakil dari kepala desa pada setiap dusun yang ada. Kepala dusun bertanggungjawab langsung kepada

kepala desa dalam urusan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat dusun masing-masing.<sup>100</sup>

b. Struktur BPD Bahway

Seperti halnya dengan Perangkat Desa, BPD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai susunan organisasi BPD sebagai berikut:

- a. Unsur pimpinan, dan bidang-bidang dibantu oleh Sekretariat Desa
- b. Pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
- c. Sekretaris Desa sebanyak-banyaknya 1 orang
- d. Anggota BPD terdiri dari 6 orang anggota



Sumber Data: Sumber di peroleh dari kantor Desa

c. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPD Bahway

1) Pelaksanaan tugas BPD

---

<sup>100</sup> Sumber data dari kantor Desa

Pelaksanaan tugas BPD di Desa Bahway sudah berjalan dengan baik, BPD Bahway bersama Pemerintah Desa Bahway telah menetapkan peraturan desa Bahway, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Bahway.

## 2) Pelaksanaan Wewenang BPD

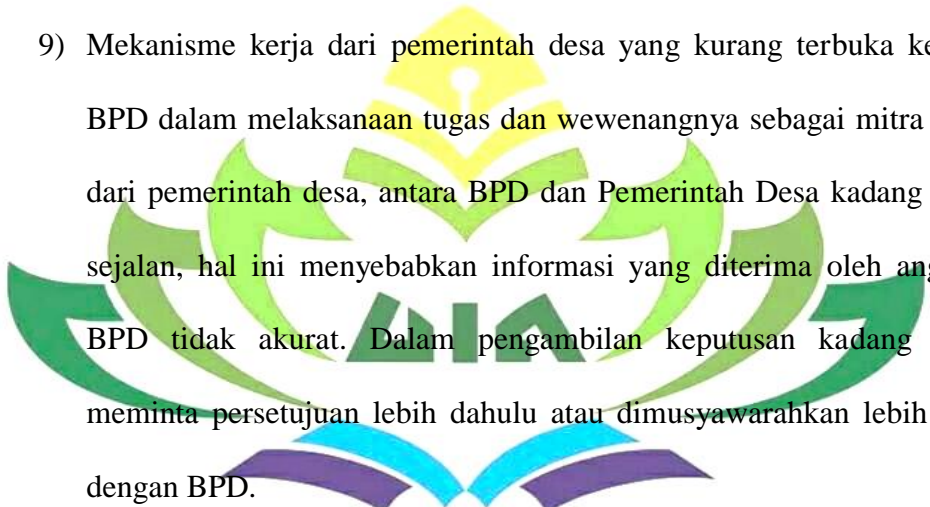
BPD Bahway mempunyai wewenang:

- mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Camat ketika telah habis masa jabatan Kepala Desa tersebut.
- BPD juga mempunyai wewenang untuk membahas pembangunan Desa bersama pemerintah Desa.
- Mengawasi jalannya peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- Menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Bahway.

dalam pelaksanaan wewenangnya untuk menggali, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD menyampaikan kepada Kepala Desa dan mengenai pelaksanaannya kemudian dibahas bersama dengan BPD dan Perangkat Desa Bahway. Salah satu wujud dari tindak lanjut aspirasi dari masyarakat adalah mengenai perbaikan jalan dan pembangunan akses jalan menuju lokasi pertanian.

d. Kendala yang dihadapi BPD dalam mensejahterakan masyarakat Desa  
Bahway

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPD sangat di  
mungkinkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD sebagai mitra  
kerja dari Pemerintah Desa ada faktor-faktor yang menghambat jalannya  
pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut:

- 
- 9) Mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada  
BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai mitra kerja  
dari pemerintah desa, antara BPD dan Pemerintah Desa kadang tidak  
sejalan, hal ini menyebabkan informasi yang diterima oleh anggota  
BPD tidak akurat. Dalam pengambilan keputusan kadang tidak  
meminta persetujuan lebih dahulu atau dimusyawarahkan lebih dulu  
dengan BPD.
  - 10) Kurang pahamnya pemerintah desa mengenai tugas pokok BPD.
  - 11) Kesibukan anggota BPD diluar aktivitasnya sebagai BPD.
  - 12) Tidak adanya penghargaan terhadap anggota BPD.
  - 13) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD.
  - 14) Masih rendahnya pola pikir masyarakat akan arti pentingnya peran  
BPD untuk mensejahterakan masyarakat Desa.
  - 15) Warga masyarakat biasanya hanya mementingkan dan memikirkan  
pekerjaannya.

e. Penyelesaian Kendala yang dihadapi BPD dalam mensejahterakan Masyarakat Desa.

Setiap masalah pasti ada jalan keluar untuk memecahkannya. Begitu pula dengan hambatan yang dialami BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pasti ada suatu upaya atau cara untuk mengatasinya:

- 1) Melakukan rapat koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD.
- 2) Mengadakan diskusi rutin antara anggota BPD dengan pemerintah Desa untuk membahas masalah-masalah dan mencari jalan keluarnya.
- 3) Mengadakan diskusi internal anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari karena disiang hari anggota BPD sibuk dengan aktifitasnya masing-masing.
- 4) Mengadakan pelatihan, khususnya untuk anggota BPD dan umumnya untuk aparat pemerintah desa dengan memanggil seorang tutor ataupun pejabat kecamatan yang ahli dibidang ini.
- 5) Dalam menggali aspirasi dari masyarakat anggota BPD biasanya mengambil waktu malam hari, karena pada siang hari masyarakat dan mungkin anggota BPD sendiri sibuk dengan aktifitas kerjanya masing-masing.
- 6) Dalam mencari respon aspirasi masyarakat anggota BPD tidak harus dilakukan dalam sebuah forum rapat resmi, disitu anggota BPD bisa mencari apa yang dikehendaki oleh warga masyarakat demi kemajuan desa.

### C. Peranan dan Fungsi BPD di Desa Bahway

BPD Bahway telah berperan aktif dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat Desa, BPD Bahway bersama Pemerintah Desa Bahway telah menetapkan peraturan Desa. BPD telah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Bahway, namun tidak semua aspirasi masyarakat tersalurkan, seperti aspirasi masyarakat Desa Bahway tentang perbaikan jalan dan pembangunan akses jalan menuju lokasi pertanian yang sampai saat ini belum terealisasi, dan tidak adanya pasar desa.

Tugas dan wewenang BPD adalah bersama-sama pemerintah Desa menetapkan peraturan Desa dan APBD, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan/penyelenggaraan Pemerintah Desa. Ketiga hal tersebut sama halnya dengan fungsi legislasi, fungsi menampung aspirasi masyarakat, dan fungsi pengawasan. Adapun aplikasi pelaksanaan dari ketiga fungsi tersebut dapat di ungkap dari penelitian di bawah ini:

#### a. Fungsi legislasi

BPD Bahway telah membentuk peraturan Desa tentang APBD tahun 2016-2021 yang di bahas bersama pemerintah Desa. Dalam melaksanakan fungsinya yaitu dalam menetapkan peraturan Desa dan anggaran pendapatan Desa dan belanja Desa, selama ini BPD Bahway telah membentuk peraturan



Desa yang dibahas dengan Kepala Desa diantaranya peraturan Desa tentang APBD tahun 2016-2021.<sup>101</sup>

Dalam bidang legislasi atau perundang-undangan Desa Bahway telah sesuai dengan fungsi BPD yaitu membentuk peraturan desa dan APBD yang dibahas dengan Kepala Desa.

b. Fungsi dalam bidang menampung aspirasi masyarakat

BPD Bahway selalu membuka kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat desa yang ingin menyampaikan aspirasinya, atau yang ingin menyampaikan usulan-usulan tentang kepentingan Desa Bahway, dan BPD telah menyalurkan aspirasi masyarakat walau tidak semua aspirasi masyarakat Desa Bahway di tindak lanjuti.

BPD Desa Bahway dalam fungsinya menampung aspirasi masyarakat, telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa aspirasi dari masyarakat yang belum bisa dilaksanakan.

c. Fungsi dalam bidang pengawasan

BPD mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan kebijakan Pemerintah Desa. BPD Bahway pernah mengawasi terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan Desa yaitu mengenai alokasi dana. Dalam ketentuan tercantum adanya bagian dana yang seharusnya masuk ke dalam kas Desa. Namun realitanya tidak seperti itu, dana yang di dapat tidak masuk kedalam kas Desa tetapi digunakan oleh sebagian pihak untuk

---

<sup>101</sup> Heri Gunawan, wawanca dengan penulis, Bahway, 09 Oktober 2017.

memenuhi kepentingan pribadi mereka sendiri. Mengenai hal ini tidak ada konsekuensi lebih lanjut dari pengawasan yang dilakukan BPD, dibiarkan begitu saja.<sup>102</sup>

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut telah dilakukan BPD Bahway dengan baik.

Tugas dan wewenang BPD adalah bersama Pemeritah Desa menetapkan peraturan Desa dan APBD, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemerintahan Desa”<sup>103</sup>

Adapun wewenang yang dilakukan oleh anggota BPD antara lain, mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa terutama pada pelaksanaan APBD, membentuk tim pelaksanaan kegiatan dalam hal pengelolaan keuangan Desa”.<sup>104</sup>

Sebagai fungsi aspirasi masyarakat BPD memiliki wewenang antara lain, menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

---

<sup>102</sup> Sahren, wawancara dengan penulis, Bahway, 09 Oktober 2017

<sup>103</sup> Indra Makmur, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 08 Oktober 2017

<sup>104</sup> Heri Gunawan, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 09 Oktober 2017.

terutama aspirasi masyarakat dalam hal perbaikan jalan dan pembuatan akses jalan menuju area pertanian”.<sup>105</sup>

Kendala yang di hadapi oleh anggota BPD dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya antara lain adalah kurang terbukanya pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, hal ini terjadi karena biasanya ada selisih pendapat sehingga biasanya pemerintah desa dalam mengambil kebijakan tidak meminta persetujuan BPD. Selain itu masalah yang dihadapi adalah kurang pahamnya pemerintah desa mengenai tugas pokok BPD contohnya dalam pembuatan peraturan atau kebijakan mengenai alokasi dana pembangunan Desa”.<sup>106</sup>

Kesibukan anggota BPD diluar aktivitasnya sebagai BPD. Selain sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yng memiliki mata pencahrian lain di luar aktivitasnya sebagai anggota BPD diantaranya sebagai pedagang, petani, dan swasta. Karena kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau berdiskusi antar anggota BPD (lingkupnya dalam BPD tidak memiliki waktu yang banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus terhadap kedudukannya di dalam BPD. Selain itu masalah yang dihadapi BPD adalah tidak adanya penghargaan terhadap anggota BPD (dana oprasional tidak mencukupi). Kadang dana oprasional tidak yang didapat BPD

---

<sup>105</sup> Sriono, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 09 Oktober 2017.

<sup>106</sup> Indra Makmur, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 08 Oktober

tidak sesuai dengan dana yang seharusnya diterima oleh anggota BPD yaitu 10% dari pendapatan asli Desa”.<sup>107</sup>

Masih rendahnya pola pikir masyarakat akan arti pentingnya peran BPD untuk mensejahterakan masyarakat Desa, hal ini terjadi karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat desa adalah lulusan SD bahkan ada juga beberapa masyarakat yang tidak samasekal mengenyam bangku sekolah, hal ini yang menjadi kendala dalam proses demokratisasi di desa”.<sup>108</sup>

Warga masyarakat biasanya hanya mementingkan dan mimikirkan pekerjaannya, mereka cenderung tidak mau tahu akan urusan pemerintahan desa mereka menganggap bahwa urusan pemerintahan hanya di urus oleh aparatur pemerintahan Desa saja”.<sup>109</sup>

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah desa dengan BPD maka biasanya dilakukan rapat koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD. Rapat koordinasi ini membahas mengenai pendapat-pendapat yang berbeda kemudian di musyawarahkan secara kekeluargaan”.<sup>110</sup>

Mengadakan diskusi rutin antara anggota BPD dengan pemerintah Desa untuk membahas masalah-masalah dan mencari jalan keluarnya, dengan ini maka pemerintah desa dapat memahami kedudukan BPD didesa. Untuk mengatasi

---

<sup>107</sup> Lazuardi, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 08 Oktober 2017

<sup>108</sup> Ihwan, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 09 Oktober 2017

<sup>109</sup> Sahren, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 09 Oktober 2017

<sup>110</sup> Indra Makmur, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 08 Oktober

kesibukan anggota BPD diadakan diskusi internal anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari karena disiang hari anggota BPD sibuk dengan aktifitasnya masing-masing. Mengadakan pelatihan, khususnya untuk anggota BPD dan umumnya untuk aparat pemerintah Desa dengan memanggil seorang tutor ataupun pejabat Kecamatan yang ahli dibidang ini”.<sup>111</sup>

Dalam menggali aspirasi dari masyarakat anggota BPD biasanya mengambil waktu malam hari, karena pada siang hari masyarakat dan mungkin anggota BPD sendiri sibuk dengan aktifitas kerjanya masing-masing, selain itu dalam mencari respon aspirasi masyarakat anggota BPD tidak harus dilakukan dalam sebuah forum rapat resmi, disitu anggota BPD bisa mencari apa yang dikehendaki oleh warga masyarakat demi kemajuan desa”.<sup>112</sup>

Dalam melaksanakan fungsinya yaitu dalam menetapkan Peraturan Desa dan anggaran pendapatan Desa dan belanja Desa, selama ini BPD Bahway telah membentuk peraturan Desa yang dibahas dengan Kepala Desa diantaranya peraturan Desa tentang APBD tahun 2016-2021”.<sup>113</sup>

Sebagai lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD Bahway selalu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Bahway yang memiliki usulan-usulan untuk kepentingan desanya. aspirasi masyarakat bisa disalurkan kapan saja kepada anggota BPD, maupun

---

2017 <sup>111</sup> Zainal Hasnan, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 09 Oktober

<sup>112</sup> Sriono, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 09 Oktober 2017

<sup>113</sup> Heri Gunawan, wawanca dengan penulis, Bahway, 09 Oktober 2017.

pemerintah Desa, dimana saja mereka bertemu, baik secara lisan maupun tertulis”.<sup>114</sup>

Pada dasarnya BPD memiliki peran sebagai badan yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam jalannya pemerintahan Desa, selain itu BPD juga memiliki tugas untuk mengawasi kinerja dari kepala Desa, selain itu fungsi BPD sangat strategis karena dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa dalam hal ini kepala Desa, tidak dapat begitu saja mengambil sebuah kebijakan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan terlebih dahulu dari BPD, dari peran yang dimiliki BPD inilah BPD dituntut untuk dapat menyerap, dan menggali setiap kehendak dari masyarakat. Aspirasi dari masyarakat tersebut biasanya didapat oleh anggota BPD dengan jalan diadakannya rapat, atau musyawarah dengan warga Desa, selain itu masukan kepada BPD juga bias di dapat melalui cara yang tidak formal, dalam artian BPD menggali aspirasi masyarakat dengan cara ketika ada pembicaraan-pembicaraan ringan dengan warga masyarakat saat warga berkumpul atau saat santai, cara inilah yang dianggap paling efektif untuk mendapat dan menampung aspirasi masyarakat Desa”.<sup>115</sup>

Aspirasi masyarakat bisa diberikan kapan saja kepada anggota BPD, setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka aspirasi itu di tampung dan di olah oleh anggota BPD dan kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintahan Desa. Dalam menentukan aspirasi mana yang akan di penuhi, biasanya ditentukan

---

<sup>114</sup> Edi Saputra, wawancara dengan penulis, Bahway, 08 Oktober 2017.

<sup>115</sup> Edi Saputra, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 09 Oktober 2017



berdasarkan skala prioritas kebutuhan, dana, dan tenaga. Skala prioritas terhadap semua aspirasi tersebut akan menjadi keputusan desa yang dijadikan program Desa. Program-program Desa mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat desa sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat Desa”.<sup>116</sup>

Sedangkan mengenai peran BPD dalam mensejahterakan masyarakat Desa memiliki fungsi pokok yaitu menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat. Adapun langkah-langkah yang di ambil oleh BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa adalah dengan mengundang para tokoh masyarakat seperti kiyai atau pemuka agama, rukun tetangga, rukun warga, perwakilan masyarakat dalam pembahasan atau rapat pembuatan kebijakan desa. Selain itu anggota BPD harus berperan aktif dalam mencari masukan dari masyarakat salah satunya adalah dengan cara saat warga masyarakat membicarakan suatu masalah, seperti pembicaraan mengenai pembangunan jalan atau pembangunan sarana masyarakat lainnya. Anggota BPD bisa merespon apa yang menjadi kehendak masyarakat, kemudian respon tersebut di sampaikan kepada pemerintah Desa yang selanjutnya akan di tindak lanjuti dalam proses pelaksanaan nantinya”.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Heri Gunawan, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 09 Oktober 2017

<sup>117</sup> Subhani, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 09 Oktober 2017



## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan dan Fungsi Lembaga Himpunan Pekon (LHP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Bahway**

Dari hasil penelitian yang penulis teliti, peranan dan fungsi Lembaga Himpunan Pekon (LHP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bahway telah berjalan sesuai dengan peran dan fungsi LHP.

Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam peraturan perundang – undangan sejak era reformasi regulasi yang mengatur tentang desa terdiri dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menegaskan bahwa: “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa”.<sup>118</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan alasan filosofi kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 BPD mempunyai fungsi sebagai berikut: “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintah Daerah*.

<sup>119</sup> Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 BPD berfungsi sebagai berikut: “BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”<sup>120</sup>

Sampai dengan lahirnya Undang-Undang baru tentang desa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>121</sup>

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa..
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.<sup>122</sup>

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

---

<sup>120</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.

<sup>121</sup> Undang – Undang RI No 6 Tahun 2014 *tentang Desa*

<sup>122</sup> Permendagri Nomor 110 Tahun 2016

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>123</sup>

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 13 tahun 2006 LHP mempunyai peran sebagai berikut:

1. Menetapkan peraturan Pekon bersama Peratin.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Bersama Peratin membahas APBP.<sup>124</sup>

Menurut Peraturan Pekon Bahway Nomor 2 Tahun 2016 Lembaga Himpunan Pekon berperan sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Pekon bersama Peratin.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pekon.
3. Dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pekon sebagaimana dimaksud huruf (c) LHP melaksanakan kunjungan kerja kewilayahan sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun.
4. Melakukan pengawasan kinerja peratin.<sup>125</sup>

Menurut Bambang BPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

---

<sup>123</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016

<sup>124</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2015

<sup>125</sup> Peraturan Desa Pekon Bahway Nomor 2 Tahun 2016

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyusun tata tertib BPD.<sup>126</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Bahway, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, peran dan fungsi LHP Bahway adalah sebagai berikut:

1. LHP Bahway bersama Kepala Desa menetapkan peraturan Desa Bahway.

Dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa, tidak dapat begitu saja mengambil sebuah kebijakan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan terlebih dahulu dari LHP.

2. LHP Bahway melaksanakan kewajibannya yaitu, membahas rancangan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa Bahway.

LHP Bahway telah membentuk peraturan Desa tentang APBD Desa tahun 2016-2021 yang di bahas bersama pemerintah Desa, dan rencana pembangunan jangka menengah Pekon (RPJM-PEKON) Bahway tahun 2016-2021. LHP Bahway juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa terutama pada pelaksanaan APBD Bahway, dan

---

<sup>126</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Op.Cit.* h. 14

pembentukan tim pelaksanaan kegiatan dalam hal pengelolaan keuangan Desa.<sup>127</sup>

3. LHP Bahway Menggali, menghimpun, merumuskan aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Bahway.

LHP Bahway selalu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Bahway yang memiliki usulan-usulan untuk kepentingan desanya, contohnya seperti usulan masyarakat Desa Bahway kepada LHP untuk menyampaikan kepada pemerintah Desa agar membangun akses jalan menuju area pertanian masyarakat Desa, karna hanya ada jalan setapak yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Desa Bahway menuju lahan pertanian mereka sehingga mereka mengalami kesulitan saat membawa hasil panen mereka dari lahan pertanian mereka menuju Desa. Aspirasi masyarakat biasanya diberikan kapan saja kepada anggota LHP, setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka aspirasi itu di tampung dan di olah anggota LHP dan kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintahan Desa. Dalam menentukan aspirasi mana yang akan di penuhi, biasanya ditentukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan, dana, dan tenaga. Skala prioritas terhadap semua aspirasi tersebut akan menjadi keputusan Desa yang dijadikan program Desa. Program-program Desa mencangkup seluruh aspek kehidupan

---

<sup>127</sup> Heri Gunawan, Wawancara dengan Penulis, Desa Bahway, Lampung Barat, 09 Oktober 2017

masyarakat untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat Desa sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat Desa.

Selain itu masukan kepada LHP juga bisa di dapat melalui cara yang tidak formal, dalam artian LHP menggali aspirasi masyarakat dengan cara ketika ada pembicaraan-pembicaraan ringan dengan warga masyarakat saat warga berkumpul atau saat santai, cara inilah yang dianggap paling efektif untuk mendapat dan menampung aspirasi masyarakat Desa.

4. LHP Bahway Menyusun tata tertib LHP Bahway.
5. LHP Bahway mengadakan musyawarah dengan warga Desa Bahway.

LHP bahway mengadakan musyawarah dengan masyarakat Desa Bahway untuk menggali aspirasi masyarakat. Dalam menggali aspirasi dari masyarakat anggota LHP biasanya mengambil waktu malam hari, karena pada siang hari masyarakat dan anggota LHP sendiri sibuk dengan aktifitas kerjanya masing-masing, selain itu dalam mencari respon aspirasi masyarakat anggota LHP tidak harus dilakukan dalam sebuah forum rapat resmi. Musyawarah tersebut dilakukan dengan mengundang para tokoh masyarakat seperti kiyai atau pemuka Agama, rukun tetangga, rukun warga, perwakilan masyarakat dalam pembahasan atau rapat pembuatan kebijakan desa.

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan mengenai peran LHP Bahway yaitu sebagai lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, LHP Bahway selalu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi

masyarakat yang memiliki usulan-usulan untuk kepentingan desanya, LHP bahway telah menjalankan beberapa peran nya dalam mensejahterakan masyarakat desanya, namun masih kurang aktif dan masih ada beberapa aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan.

Aspirasi masyarakat bisa diberikan kapan saja kepada anggota LHP, dimana saja mereka bertemu, baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan hasil wawancara di atas, terungkap bahwa selama ini LHP Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah mampu menampung aspirasi masyarakat meskipun tidak semua aspirasi ditindak lanjuti dan cukup aspiratif.

#### **B. Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Himpunan Pekon (LHP) dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.**

Islam merupakan *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta alam) di dalam ajarannya berisikan tentang banyak hal, masalah pembangunan dan kesejahteraan merupakan masalah yang sangat penting karena dengannya kehidupan akan berjalan dengan baik.

Dalam menjalankan pemerintahan didalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya, tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban



tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual (kejiwaan), hal ini sejalan dengan *qaidah fiqh*. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu adalah:

1. Semua yang mengandung *madllarat* harus dijaui atau dihindari.
2. Dalam menghindari dan menghilangkan *madllarat* ditempuh prinsip-prinsip:
  - a) Dalam menghilangkan yang *madllaratnya*, tidak boleh dengan menempuh *madllarat* yang sama atau yang lebih berat *madllaratnya*.
  - b) Dalam menghilangkan *madllarat* yang umum ditempuh dengan *madllarat* yang khusus, atau yang lebih ringan bila tidak ada jalan lain.
3. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak *kemadllaratan*.
4. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.<sup>128</sup>

Dalam Islam terdapat lima jaminan dasar dalam pengembangan peradaban yaitu:

1. Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum.
2. Keselamatan keyakinan Agama masing-masing, tanpa adanya paksaan untuk berpindah Agama.
3. Keselamatan keluarga dan keturunan.

---

<sup>128</sup> Asjumni A.Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986, h.3-4.

4. Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum.
5. Keselamatan profesi.

Dalam *fiqh siyash*, terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat, yakni terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58)<sup>129</sup>

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazarin dan dikembangkan oleh Sajuti Thalib,<sup>130</sup> maka dari ayat itu dapat ditarik dua garis hukum, yaitu: pertama, manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum kedua yaitu manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Kata amanah dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dapat dipahami kata amanah itu adalah suatu pendelegasian atau

---

<sup>129</sup> Departement Agama, Al-qur'an dan Terjemah, 2002

<sup>130</sup> Muhammad Tahir, Negara Islam, 1999, h.79

pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah.

Kekuasaan dalam Islam adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. kekuasaan itu kelak harus dipertanggung jawabkan kepada Allah.<sup>131</sup>

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam Surah Al Imran ayat 188 sebagai berikut:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَتُحِبُّونَ أَنْ تَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Janganlah sekali-kali kamu meyakini, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.” (Q.S. Al-Imran: 188)<sup>132</sup>

Dengan demikian sudah jelas pentingnya pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah Desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya ditingkat pemerintah Desa, karena dalam Al-Qur'an pada surah Al-Imran ayat 188, Allah memerintahkan umat-Nya untuk mengambil dan menjanjikan orang-orang yang dipercaya dalam menjalankan roda

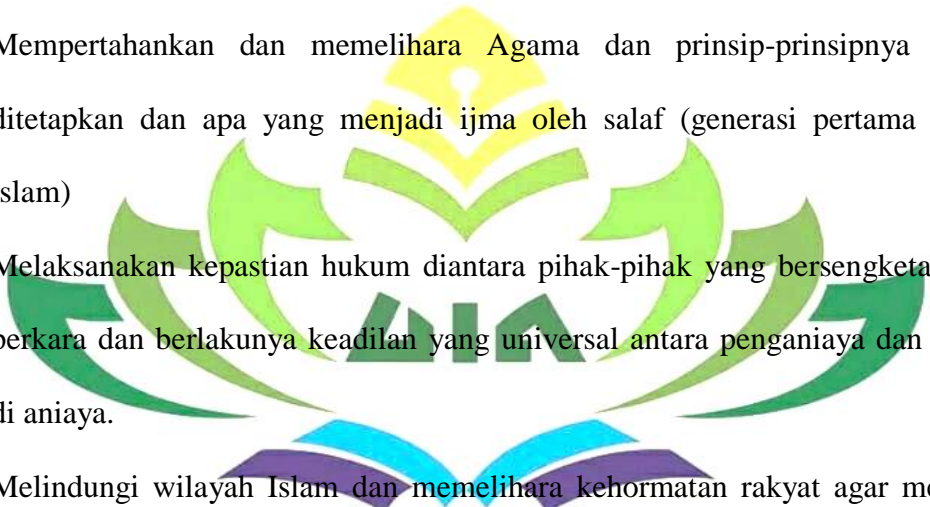
---

<sup>131</sup> Ibid

<sup>132</sup> Department Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Fajar Mulia, 2002), 108

pemerintahan pusat maupun desa yaitu orang-orang berasal dari golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal-usul dan adat istiadat kebiasaan masyarakat setempat.

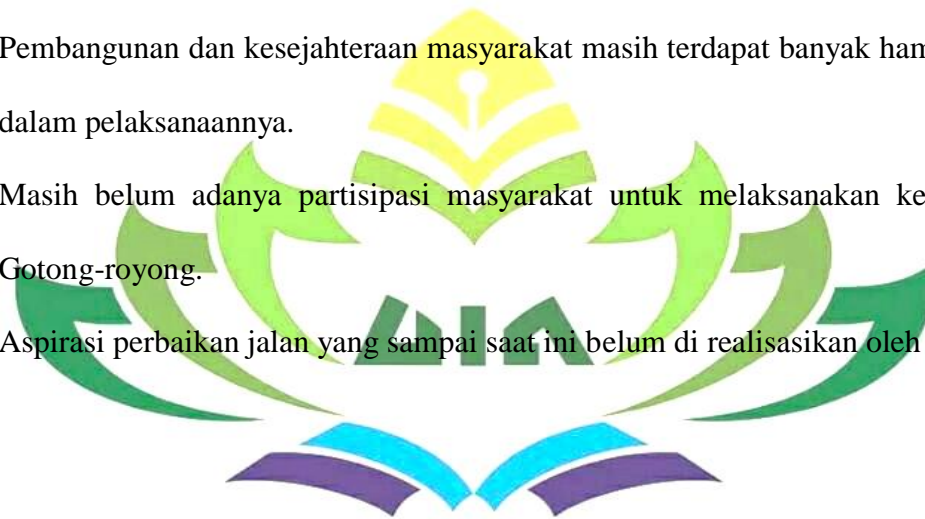
Dengan dipilihnya kepala pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga imamah (pemerintah) mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan oleh imam Al-Mawardi sebagai berikut:

- 
1. Mempertahankan dan memelihara Agama dan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma oleh salaf (generasi pertama umat islam)
  2. Melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau perkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang di aniaya.
  3. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta.
  4. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Allah.
  5. Membentuk kekuatan untuk melawan musuh.
  6. Jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.
  7. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash dan ijtihad.
  8. Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
  9. Meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya.

10. Mengatur umat dan memelihara Agama, pemerintah dan Kepala Negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Namun pada implementasinya, hakikat dan makna serta tujuan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyash* belum dapat direalisasikan secara utuh oleh LHP Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat:

1. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Masih belum adanya partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Gotong-royong.
3. Aspirasi perbaikan jalan yang sampai saat ini belum di realisasikan oleh LHP.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Lembaga Himpunan Pekon Bahway berperan sebagai penghubung antara masyarakat Desa Bahway dan Pemerintah Desa Bahway, LHP Bahway berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Bahway, LHP Bahway menggali, menghimpun, dan merumuskan aspirasi masyarakat, lalu LHP Bahway menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Bahway kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah Desa Bahway. Aspirasi masyarakat bisa diberikan kapan saja kepada anggota LHP, setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka aspirasi itu di tampung dan di olah oleh anggota LHP dan kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintahan Desa Bahway, LHP Bahway mengadakan musyawarah dengan warga Desa Bahway, LHP Bahway bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan rancangan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa Bahway. LHP Bahway menjalankan peran dan fungsinya sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam mensejahterakan masyarakat Desa Bahway, namun masih kurang aktif dan

masih banyak aspirasi masyarakat Desa Bahway yang belum tersalurkan seperti aspirasi masyarakat Desa Bahway dalam 1. Perbaikan jalan Desa Bahway, 2. Pembuatan akses jalan menuju area pertanian.

2. Dalam *fiqh siyash*, terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat yaitu: pertama, manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, garis hukum kedua yaitu manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. namun pada kenyataannya LHP Bahway belum sepenuhnya menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan *fiqh siyash*.

## **B. Saran**

Dari hasil penilaian tentang peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mensejahterakan Masyarakat Desa Bahway, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi antar Pemerintah Desa khususnya perangkat Desa dengan LHP harus ditingkatkan, sehingga dalam pelaksanaannya tugas dan wewenang masing-masing dapat berjalan intensif dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar. Komunikasi ini dilakukan dengan jalan meningkatkan intensitas pertemuan (dialog) yang tempatnya bergantian di rumah masing-masing perangkat Desa dan LHP, sehingga suasana kekeluargaan semakin terasa dilingkungan anggota-anggota pemerintahan Desa.



2. Anggota LHP diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada tugas dan wewenangnya agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya antar anggota LHP dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik antar anggota. LHP diharapkan bersama pemerintah Desa untuk dapat segera memperbaiki jalan Desa Bahway agar mempermudah masyarakat Desa Bahway dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari sehingga kesejahteraan Desa akan tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djazuli. 2003. *Fiqih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*. Jakarta. Kencana.
- Wasistiono, sadu.dan Tahrir, Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Fokus Media.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta. Rajawali.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2016 Tentang Desa
- Himpunan Peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- Soemantri, Trisantono, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung. Fokus Media.
- Widi, Kartiko, Restu. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arikanto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta. Rineka Cipta
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an Terjemah al-aliyy*. Bandung. Diponegoro.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta. Gaya Media.
- Saebani Ahmad Beni. 2008. *Fiqih Siyasa*. Bandung. Pustaka Setia.
- Ritaudin Sidi. 2015. *Etika Politik Islam*. IAIN Raden Intan Lampung. Fakultas Ushuluddin.

- Maschab Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Indonesia*. Yogyakarta. Polgov.
- Undang – Undang RI No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016,  
*tentang Desa*
- Ndraha Taliziduhu.1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*.Jakarta. Bumi  
Aksara.
- Sodiq Amirus, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, STAIN Kudus
- Riyadi. 2011. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*
- Suharto Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.
- Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang *ketentuan-ketentuan kesejahteraan  
sosial*
- Wawancara Sekretaris Desa
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM-PEKON) Tahun  
2016-2021
- Sumber Data dari Kantor Kepala Desa Bahway
- Profil Desa Bahway
- Hasil wawancara Kepala Desa Bahway
- wawancara oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Bahway pada tanggal 08 Oktober  
2017
- Departement Agama. 2002. *Al-qur'an dan Terjemah*. Surabaya. Fajar Mulia.
- Muhammad Tahir. 1999. Negara Islam.
- Salam Syamsir dan Fadilah Amir. 2002. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta. Lembaga  
Penelitian UIN Syarif Hidayatullah
- Assidiqie Jimly. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta. Rajawali.

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas

Nama : Azhar Effendi  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : Bahway

### 2. Pertanyaan

a. Apakah anda asli warga Desa Bahway?

Jawab: Iya

b. Apakah anda tahu budaya Desa Bahway? Dalam pemerintahan misalnya?

Jawab : Seperti desa-desa lainnya yang memiliki budaya, Desa Bahway pun memiliki budayanya sendiri, contohnya dalam pemerintahan, jika di desa lain pemimpin desa disebut Kepala Desa, namun di Desa Bahway sebutan pemimpin desa adalah Peratin, dan jika di desa lain dewan desa di sebut BPD (badan permusyawaratan desa) di desa bahway di sebut LHP (lembaga himpunan pekon).

Bahway, 08 Oktober 2017

Responden,

Azhar Effendi

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas Responden

- a. Nama : Edi Saputra
- b. Umur : 29 Tahun
- c. Pendidikan: S1
- d. Alamat : Bahway

### 2. Daftar Pertanyaan

- a. Apakah anda asli warga Bahway?

Jawab : Iya

- b. Apakah Anda tahu Sosial Budaya Desa Ini. Budaya apa saja kah yang masih di lakukan oleh Masyarakat Desa Bahway?

Jawab : Ada beberapa budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat Bahway, seperti “Ninggam Pudak” dimana masyarakat Desa Bahway beramai-ramai mendatangi Rumah warga yang meninggal dunia untuk berbela sungkawa, lalu “Hahayaman” biasanya di adakan jika ada seseorang yang meninggal, tujuannya untuk menghibur Keluarga yang ditinggalkan, biasanya Hahayaman diadakan dimalam Pertama setelah Tahlilan. Didesa Bahway biasanya setiap hari-hari besar seperti hari raya idul fitri dan hari-hari besar lainnya, masyarakat Desa Bahway mengadakan “sakuraan” acara ini dilakukan sebagai rasa syukur masyarakat Desa kepada sang pencipta. Ada juga “Nyambai” yaitu suatu acara yang diadakan ketika ada seseorang yang menikah, biasanya acara ini diadakan oleh pemuda pemudi Desa Bahway.

- c. Bagaimana peran dan kewajiban BPD dalam mensejahterakan Masyarakat Desa?

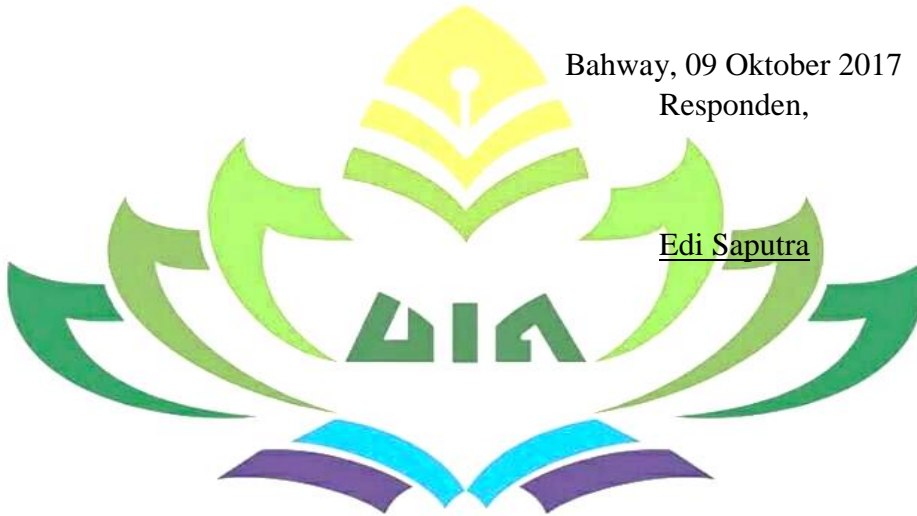
Jawab : Pada dasarnya BPD memiliki peran sebagai badan yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam jalannya pemerintahan Desa, selain itu BPD juga memiliki tugas untuk mengawasi kinerja dari kepala Desa, selain itu fungsi BPD sangat strategis karena dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa dalam hal ini kepala Desa, tidak dapat begitu saja mengambil sebuah kebijakan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan terlebih dahulu dari BPD, dari peran yang dimiliki BPD inilah BPD dituntut untuk dapat menyerap, dan menggali setiap kehendak dari masyarakat. Aspirasi dari masyarakat tersebut

biasanya didapat oleh anggota BPD dengan jalan diadakannya rapat, atau musyawarah dengan warga Desa, selain itu masukan kepada BPD juga bias di dapat melalui cara yang tidak formal, dalam artian BPD menggali aspirasi masyarakat dengan cara ketika ada pembicaraan-pembicaraan ringan dengan warga masyarakat saat warga berkumpul atau saat santai, cara inilah yang dianggap paling efektif untuk mendapat dan menampung aspirasi masyarakat Desa

Bahway, 09 Oktober 2017

Responden,

Edi Saputra



## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas

Nama : Sumiyati (Kepala Desa)  
Umur : 45 Tahun  
Pendidikan : S1  
Alamat : Sukarame, Kecamatan Balik Bukit

### 2. Pertanyaan

a. Apakah anda asli warga Desa Bahway?

Jawab : Iya

b. Apakah benar anda Kepala Desa Bahway?

Jawab : Benar

c. Program apasaja yang di lakukan oleh Pemerintah desa dalam mensejahterakan Masyarakat Desa Bahway?

Jawab : untuk kesejahteraan masyarakat disini sudah lumayan baik, namun belum maksimal. Pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan program-program dibidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan, yang dilaksanakan secara bertahap, misalnya saat ini kami fokuskan pada perbaikan jalan, pembangunan akses jalan menuju lahan pertanian, irigasi, jembatan yang merupakan jalur transportasi masyarakat sehari-hari untuk menjalankan aktifitas, dan mengadakan Pasar Desa.

Bahway, 08 Oktober 2017  
Responden,

Sumiyati



## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas

Nama : Peri Mustika  
Umur : 30 Tahun  
Pendidikan : SLTA  
Alat : Bahway

### 2. Pertanyaan

a. Apakah anda asli warga Desa Bahway?

Jawab : Iya

b. Apa saja yang di lakukan Pemerintah desa dalam Penyelenggaran Pemerintahan desa di desa Bahway?

Jawab : dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, ada beberapa yang dikerjakan, seperti pendata penduduk yang di perbaharui setiap tahunnya, selain itu, ada juga mengenai penetapan organisasi pemerintahan Desa seperti struktur Desa, itu sangat dibutuhkan supaya masyarakat pada umumnya dapat mengetahui siapa saja perangkat-perangkat Desa. Untuk di bidang pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan itu hamper berupa pelayanan dasar seperti pemenuhan sarana prasarana, dan meningkatkan SDM.

Bahway, 08 Oktober 2017  
Responden,

Peri Mustika

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas

Nama : Indra Makmur  
Umur : 50 Tahun  
Pendidikan : S1  
Alamat : Bahway

### 2. Pertanyaan

a. Apakah anda asli warga Desa Bahway?

Jawab : Iya

b. Bagaimana peran dan Kewajiban BPD dalam mensejahterakan Masyarakat Desa Bahway?

Jawab : Peran BPD antara lain adalah bersama Kepala Desa menetapkan peraturan Desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan kewajiban BPD adalah membahas rancangan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, menggali, menghimpun, merumuskan aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun tata tertib BPD

c. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang BPD ?

Jawab : Tugas dan wewenang BPD adalah bersama Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa dan dan APBD, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemerintahan Desa

d. Kendala apa yang di hadapi BPD dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya?

Jawab : Kendala yang di hadapi oleh anggota BPD dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya antara lain adalah kurang terbukanya pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, hal ini terjadi karena biasanya ada selisih pendapat sehingga biasanya pemerintah desa dalam mengambil kebijakan tidak meminta persetujuan BPD. Selain itu masalah yang dihadapi adalah kurang pahamnya pemerintah desa mengenai tugas pokok BPD contohnya dalam pembuatan peraturan atau kebijakan mengenai alokasi dana pembangunan Desa

- e. Langkah apa yang di ambil BPD dalam menyelesaikan Kendala yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang BPD?

Jawab : Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah desa dengan BPD maka biasanya dilakukan rapat koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD. Rapat koordinasi ini membahas mengenai pendapat-pendapat yang berbeda kemudian di musyawarahkan secara kekeluargaan.

Bahway, 08 Oktober 2017

Responden,

Indra Makmur



## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas

Nama : Heri Gunawan  
Umur : 42 Tahun  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : Bahway

### 2. Pertanyaan

a. Apakah anda asli warga Desa Bahway?

Jawab : Iya

b. Menurut anda Bagaimana Peran dan kewajiban BPD dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa?

Jawab : Aspirasi masyarakat bisa diberikan kapan saja kepada anggota BPD, setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka aspirasi itu di tampung dan di olah oleh anggota BPD dan kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintahan Desa. Dalam menentukan aspirasi mana yang akan di penuhi, biasanya ditentukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan, dana, dan tenaga. Skala prioritas terhadap semua aspirasi tersebut akan menjadi keputusan desa yang dijadikan program Desa. Program-program Desa mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat desa sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat Desa

c. Menurut anda bagaimana pelaksanaan wewenang BPD?

Jawab : Adapun wewenang yang dilakukan oleh anggota BPD antara lain, mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa terutama pada pelaksanaan APBDesa, membentuk tim pelaksanaan kegiatan dalam hal pengelolaan keuangan Desa.

Bahway, 09 Oktober 2017

Responden,

Heri Gunawan

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas

Nama : Subhani  
Umur :  
Pendidikan :  
Alamat :

### 2. Pertanyaan

a. Apakah anda asli warga Desa Bhway?

Jawab : iya

b. Apakah anda salah satu anggota BPD Bahway?

Jawab : Benar

c. Langkah-langkah apa saja yang di ambil Oleh BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa?

Jawab : Dengan mengundang para tokoh masyarakat seperti kiyai atau pemuka agama, Rukun tetangga, Rukun Warga, perwakilan masyarakat dalam pembahasan atau rapat pembuatan kebijakan desa. Selain itu anggota BPD harus berperan aktif dalam mencari masukan dari masyarakat salah satunya adalah dengan cara saat warga masyarakat membicarakan suatu masalah, seperti pembicaraan mengenai pembangunan jalan atau pembangunan sarana masyarakat lainnya. Anggota BPD bisa merespon apa yang menjadi kehendak masyarakat, kemudian respon tersebut di sampaikan kepada pemerintah Desa yang selanjutnya akan di tindak lanjuti dalam proses pelaksanaan nantinya.

Bahway, 09 Oktober 2017  
Responden,

Subhani

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas

Nama : Zainal Hasnan  
Umur :  
Pendidikan :  
Alamat :

### 2. Pertanyaan

#### a. Apakah anda asli warga Desa Bahway?

Jawab : Iya

#### b. Menurut anda Bagaimanakah Pelaksanaan Wewenang BPD?

Jawab : Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Camat. Karena telah habis masa jabatan Kepala Desa. Pembahasan rancangan peraturan-peraturan Desa bersama Kepala Desa yaitu mengenai APBDesa, sumber pendapatan desa, pembangunan gedung PKK dan serba guna, dan peraturan Desa mengenai penghargaan kepada mantan Kepala Desa.

#### c. Langkah apa yang di ambil BPD dalam menyelesaikan kendala yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang BPD?

Jawab : Mengadakan diskusi rutin antara anggota BPD dengan pemerintah Desa untuk membahas masalah-masalah dan mencari jalan keluarnya, dengan ini maka pemerintah desa dapat memahami kedudukan BPD didesa. Untuk mengatasi kesibukan anggota BPD diadakan diskusi internal anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari karena disiang hari anggota BPD sibuk dengan aktifitasnya masing-masing. Mengadakan pelatihan, khususnya untuk anggota BPD dan umumnya untuk aparat pemerintah desa dengan memanggil seorang tutor ataupun pejabat kecamatan yang ahli dibidang ini.

Bahway, 09 Oktober 2017

Responden,

Zainal Hasnan

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas

Nama : Sriono  
Umur : 55 Tahun  
Pendidikan : SD  
Alamat : Bahway

### 2. Pertanyaan

#### a. Apakah anda asli warga Desa Bahway?

Jawab : Iya

#### b. Menurut anda Bagaimanakah Pelaksanaan wewenang BPD?

Jawab : Sebagai fungsi aspirasi masyarakat BPD memiliki wewenang antara lain, menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Terutama aspirasi masyarakat dalam hal perbaikan jalan dan pembuatan akses jalan menuju area pertanian.

#### c. Kendala apa yang dihadapi BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya?

Jawab : Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD sehingga kadang-kadang masyarakat dalam memberikan aspirasinya sering bingung, dan biasanya aspirasi masyarakat tersebut hanya menjadi pembicaraan di belakang dalam artian bukan di forum yang diadakan oleh pemerintah desa (Kepala Desa dan BPD) sehingga tidak jarang aspirasi masyarakat ini hanya menjadi bahan pembicaraan saja dan tidak tersalurkan.

#### d. Langkah apa yang diambil BPD dalam menyelesaikan kendala yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang BPD?

Jawab : Dalam menggali aspirasi dari masyarakat anggota BPD biasanya mengambil waktu malam hari, karena pada siang hari masyarakat dan mungkin anggota BPD sendiri sibuk dengan aktifitas kerjanya masing-masing, selain itu dalam mencari respon aspirasi masyarakat anggota BPD tidak harus dilakukan dalam sebuah forum rapat



resmi, disitu anggota BPD bisa mencari apa yang dikehendaki oleh warga masyarakat demi kemajuan desa

Bahway, 09 Oktober 2017  
Responden,

Sriono



## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas

Nama : Lazuardi  
Umur : 38 Tahun  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : Bahway

### 2. Pertanyaan

a. Apakah anda asli warga Desa Bahway?

Jawab : Iya

b. Apakah anda salah satu anggota BPD Bahway?

Jawab : Iya

c. Kendala apasajakah yang dihadapi BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya?

Jawab : Kesibukan anggota BPD diluar aktivitasnya sebagai BPD. Selain sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yng memiliki mata pencahrian lain di luar aktivitasnya sebagai anggota BPD diantaranya sebagai pedagang, petani, dan swasta. Karena kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau berdiskusi antar anggota BPD (lingkupnya dalam BPD tidak memiliki waktu yang banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus terhadap kedudukannya di dalam BPD. Selain itu masalah yang dihadapi BPD adalah tidak adanya penghargaan terhadap anggota BPD (dana oprasional tidak mencukupi). Kadang dana oprasional tidak yang didapat BPD tidak sesuai dengan dana yang seharusnya diterima oleh anggota BPD yaitu 10% dari pendapatan asli Desa.

Bahway, 09 Oktober 2017

Responden,

Lazuardi

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas

Nama : Ihwan  
Umur : 33 Tahun  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : Bahway

### 2. Pertanyaan

a. Apakah anda asli warga desa Bahway?

Jawab : Iya

b. Menurut anda Kendala apa yang dihadapi BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya?

Jawab : Masih rendahnya pola pikir masyarakat akan arti pentingnya peran BPD untuk mensejahterakan masyarakat Desa, hal ini terjadi karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat desa adalah lulusan SD bahkan ada juga beberapa masyarakat yang tidak samasekal mengenyam bangku sekolah, hal ini yang menjadi kendala dalam proses demokratisasi di desa.

Bahway, 09 Oktober 2017  
Responden,

Ihwan

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas

Nama : Sahren  
Umur : 35 Tahun  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : Bahway

### 2. Pertanyaan

a. Apakah anda asli warga Desa Bahway?

Jawab : Tidak

b. Menurut anda apakah kendala yang dihadapi BPD Bahway dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya?

Jawab : Warga masyarakat biasanya hanya mementingkan dan memikirkan pekerjaannya, mereka cenderung tidak mau tahu akan urusan pemerintahan desa mereka menganggap bahwa urusan pemerintahan hanya di urus oleh aparatur pemerintahan desa saja.

Bahway, 09 Oktober 2017  
Responden,

Sahren

## DOKUMENTASI



Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.





Wawancara penulis dengan Bapak Azhar Effendi selaku Sekretaris Desa.

